
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023



KOTA BEKASI

**BADAN
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK KOTA
BEKASI**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat hidayahnya serta inayah-Nya kami masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 dapat tersusun sesuai jadwal. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Daerah atas kinerja yang telah dicapai dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik sebagai evaluasi maupun parameter dalam meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

Sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2023, kami akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja ke depannya. Kami berharap LKIP ini dapat memenuhi harapan seluruh *stakeholders* kota dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah di Kota Bekasi.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyusun LKIP ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan NKRI yang tercinta ini dan yang terakhir, kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, karenanya sumbang saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bekasi, 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BEKASI,**

NESAN SUJANA S.T., M.T. CGCAE

Pembina Tk. I / (IV.b)

NIP. 19740708 200212 1 007

IKTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja tahun 2023 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Penertapan/Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang merupakan bentuk komitmen penuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi untuk mencapai kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi telah melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan membuat Rencana Strategis Tahun 2019-2023, Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, memiliki tugas untuk mewujudkan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, yaitu :

1. Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan
2. Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam kehidupan masyarakat
3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Berdemokrasi
4. Meningkatnya peran serta Ormas dalam Pembangunan

Dalam kaitannya tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah membuat Penertapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis yang keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik. Capaian kinerja sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	MAKNA
MISI I					
1	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Kesbangpol	BB	BB	Target Tercapai

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	MAKNA
MISI V					
1	Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan	100%	100%	Target Tercapai
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Berdemokrasi	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik	88,56%	88,56%	Target Tercapai
3	Meningkatnya peran serta Ormas dalam Pembangunan	Persentase Ormas yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah	90%	90%	Target Tercapai

Dari 4 (empat) sasaran strategis beserta sasaran indikatornya, seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Keberhasilan ini didukung oleh tersedianya APBD untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2023, Pagu murni yang dianggarkan **RP. 27.091.809.600,-** setelah perubahan menjadi **RP. 85.390.004.473,-** adapun realisasinya sebesar **RP. 77.862.899.918,-** dengan rincian untuk **Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)** dianggarkan **RP. 10.079.397.613,-** adapun realisasinya sebesar **RP. 9.078.207.469,-** untuk **Belanja Langsung Urusan (BLU)** dianggarkan **RP. 6.487.816.860,-** adapun realisasinya sebesar **RP. 5.249.641.260,-** untuk **Belanja Hibah** dianggarkan **RP. 68.822.790.000,-** adapun realisasi **RP. 63.535.051.189,-** untuk **Belanja Tidak Langsung (BTL)** dianggarkan sebesar **Rp. 8.894.620.000,-** adapun realisasinya sebesar **Rp. 7.943.269.130,-**

Secara keseluruhan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada Tahun 2023 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian pada Tahun 2023 dan seterusnya akan terus ditingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah. Agar senantiasa dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai diharapkan

adanya kerjasama, saling pengertian dari berbagai pihak yang terkait baik kritik dan saran sebagai bahan masukan untuk perbaikan dimasa datang.

Sebagai penutup, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 ada manfaatnya bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan yang semakin baik.

Semoga ALLAH SWT senantiasa membimbing kita selalu.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI.....	5
1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	11
1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI.....	13
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN DAN PENULISAN	17
BAB 2.....	19
PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	19
2.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	20
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	23
2.4 PERJANJIAN KINERJA 2023	25
BAB 3.....	29
AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	29
3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	31
3.3 REALISASI ANGGARAN	57
BAB 4.....	68
PENUTUP	68
4.1 KESIMPULAN	68
4.2 KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA	68
4.3 RENCANA TINDAK.....	70

1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu persyaratan terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Oleh karena itu, melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan misi organisasi dapat diukur dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkan. Evaluasi kinerja tersebut dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap 3 aspek, yaitu:

- 1) **Akuntabilitas Manajemen**, aspek ini terfokus pada pengukuran kesanggupan dan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya manajemen, seperti dana, asset (harta kekayaan), tenaga kerja, maupun sumber daya yang lain;

- 2) Akuntabilitas Proses,** aspek ini terfokus pada pertanggungjawaban kebijakan, strategis dan proses pelaksanaan kinerja organisasi yang telah dilakukan. Proses ini dimulai dari perumusan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian sampai dengan evaluasi serta tindakan-tindakan koreksi terhadap proses yang sudah dilakukan;
- 3) Akuntabilitas Program,** pengukuran ini dilakukan terhadap program-program organisasi yang telah dilakukan apakah telah memberikan kepuasan kepada publik. Selama ini, keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya, terutama anggaran, sedangkan yang lainnya diabaikan, seharusnya keberhasilan suatu instansi pemerintah lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya untuk mencapai hasil, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Tujuan penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, hasil guna, bersih dan akuntabel serta mendorong tercapainya good governance, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya;
3. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis;
4. Menilai apakah pencapaian output dan outcome kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan serta waktu yang disediakan.

Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2023 dimaksudkan untuk menyajikan Capaian Indikator Utama (IKU) dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Perubahan tahun 2018-2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi berkaitan langsung dengan Misi ke 1 dan Misi ke 5 yang ada pada RPJMD Perubahan Kota Bekasi maupun Sasaran yang ada pada Renstra Perubahan Tahun 2018-2023. Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Bekasi menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

- Indikator Sasaran Misi 1 :
 - 1) Nilai AKIP Badan Kesbangpol dengan satuan nilai. Indikator ini dipilih untuk mendukung sasaran strategis Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Alasan dipilihnya indikator ini adalah untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Pada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 dijelaskan bahwa Misi ke 1 RPJMD Kota Bekasi adalah Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif, serta Tujuan RPJMD mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak mulia. Misi dan tujuan RPJMD tersebut kemudian diformulasikan ke dalam IKU 1 Badan Kesbangpol.
- Indikator Sasaran Misi 5 :
 - 1) Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan dengan satuan persen (%). Indikator ini dipilih untuk mendukung sasaran strategis Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam kehidupan masyarakat.
 - 2) Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik dengan satuan persen (%) Indikator ini dipilih untuk mendukung sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Berdemokrasi
 - 3) Persentase Ormas yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah dengan satuan persen (%). Indikator ini dipilih untuk mendukung sasaran strategis Meningkatnya peran serta Ormas dalam Pembangunan.

Alasan dipilihnya 3 (tiga) indikator ini adalah untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dijelaskan bahwa Misi ke 5 RPJMD Kota Bekasi adalah Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman. Adapun Tujuan RPJMD Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman. Misi dan tujuan RPJMD tersebut kemudian diformulasikan ke dalam IKU 2, IKU 3 dan IKU 4 Badan Kesbangpol.

Jika melihat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun sebelumnya (2022) dimana 4 (empat) indikator tersebut telah terealisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra pada Tahun 2022 dan untuk tahun 2023, capaian indikator sasaran ke-1 yaitu indikator Nilai AKIP Badan Kesbangpol mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi sebesar 75,14 sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu predikat nilai BB, sasaran ke-2 yaitu Persentase Kasus Perselisihan SARA memperoleh capaian kinerja sebesar sebesar 100%, sasaran ke-3 yaitu Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik memperoleh capaian kinerja sebesar 88,56%, dan sasaran ke-4 yaitu Persentase Ormas yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 90%. Adapun pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dalam mendukung misi ke 1 (satu) dan misi ke 5 (lima) yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi pada tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan dibahas pada Bab III Akuntabilitas Kinerja pada laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi tahun 2023 ini.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 129 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi, sebagai berikut :

1. Tugas Pokok yaitu :

Membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik untuk mencapai visi dan misi Badan.

2. Fungsi, yaitu :

- 1) Perumusan program dan kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka Panjang.
- 2) Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi unsur tata usaha, kepegawaian serta rumah tangga dan perlengkapan.
- 3) Fasilitasi Penyelenggaraan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
- 4) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
- 5) Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan dan atau setiap saat penyelenggaraan kegiatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan dalam bidang Trantibum dan Politik, serta memiliki peran penting di dalam menjaga stabilitas pembangunan di Kota Bekasi. Peran tersebut akan sangat mempengaruhi kestabilan dinamika pembangunan di Kota Bekasi. Badan Kesbangpol Kota Bekasi merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Bakesbangpol adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kebijakan pelayanan di bidang urusan penunjang lainnya dalam hal Pemerintahan Umum, Trantibum, serta Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Bakesbangpol tersebut, maka diberlakukanlah Peraturan Walikota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi. Dalam Perwal tersebut dijelaskan bahwa Bakesbangpol Kota Bekasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi mempunyai fungsi:

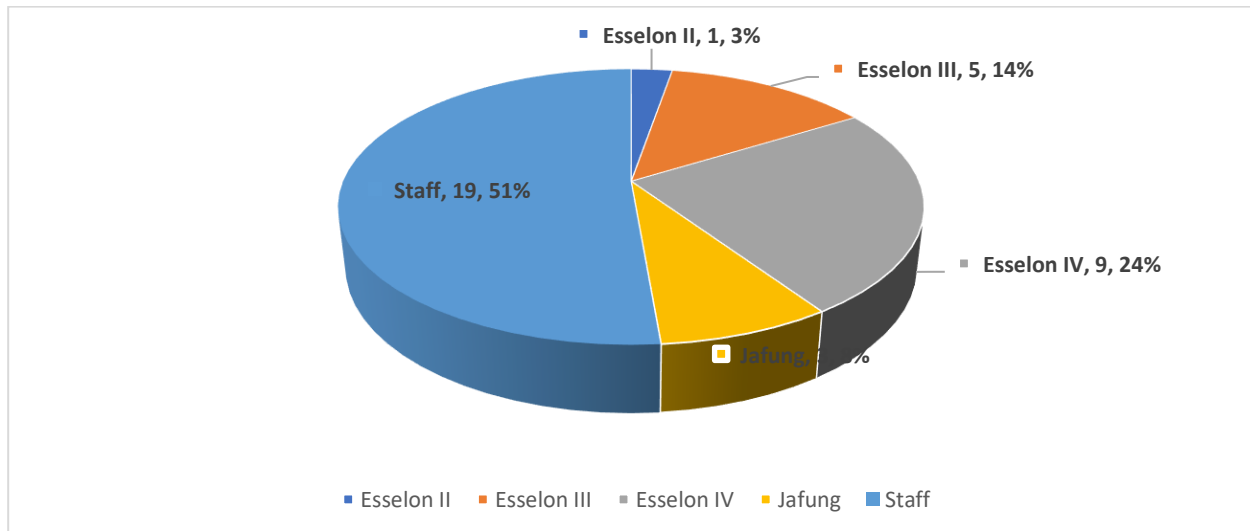
- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan, Politik Dalam Negeri, serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bakesbangpol dibantu oleh Sekretaris Bakesbangpol yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 4 (empat) bidang yaitu: Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, serta Bidang Politik Dalam Negeri.

Badan Kesbangpol Kota Bekasi dalam melaksanakan tupoksi pelayanan didukung dengan oleh 51 pegawai yang terdiri dari 41 orang Aparatur Sipil Negara dan 10 Orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Secara sederhana, gambaran pegawai pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut jabatan/ eselon dapat dilihat dari gambar diagram di bawah ini :

Gambar 1.1

Diagram Pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Esselonoring



Sejumlah pegawai yang tersedia di Badan Kesbangpol Kota Bekasi tersebut kemudian ditempatkan ke unit-unit kerja yang tersedia, dengan perincian sebagai berikut:

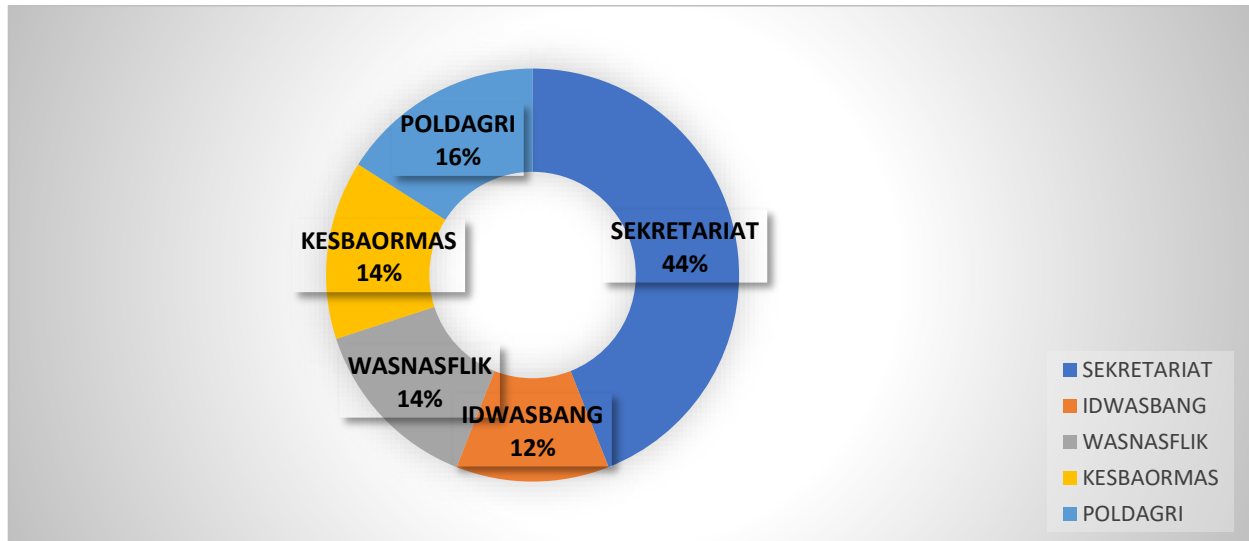
Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Berdasarkan Unit Kerja (s.d bulan Desember 2023)

NO	Sekretariat/ Bidang	ASN			TKK			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1	Sekretariat	6	7	13	4	3	7	20
2	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	3	1	4	1	1	2	6
3	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	6	1	7	-	-	-	7
4	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	5	2	7	-	-	-	7
5	Bidang Politik Dalam Negeri	6	-	6	-	1	1	7
Jumlah Total		26	11	37	5	5	10	47

Sumber Data: Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Secara sederhana, gambaran pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi berdasarkan unit kerja dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1.2**Diagram pegawai Badan Kesbangpol Berdasarkan Unit Kerja**

Apabila pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi ditinjau dari segi pendidikan, maka akan di dapatkan data pegawai sebagai berikut:

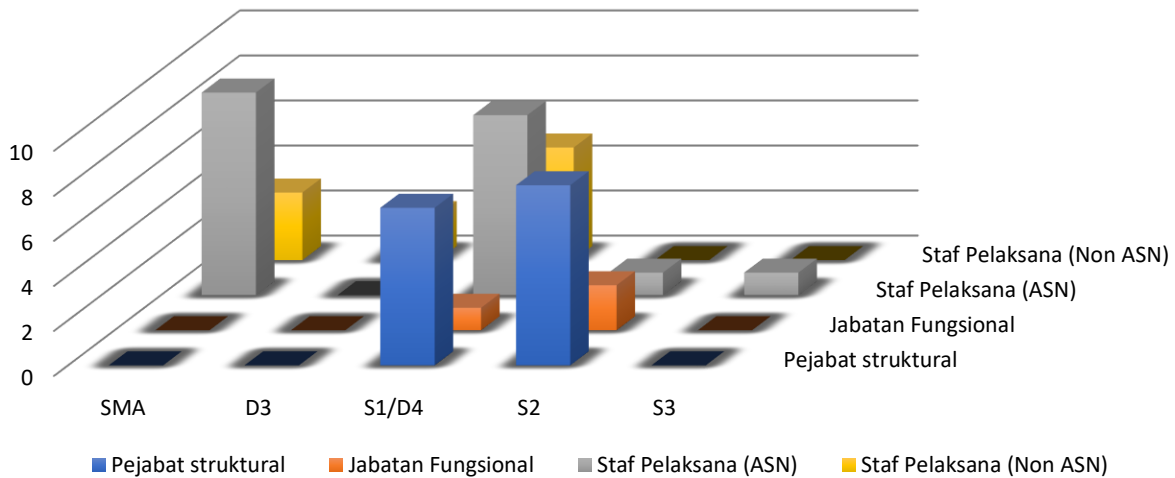
Tabel 1.2**Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi Menurut Pendidikan (s.d bulan Desember 2023)**

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir				
		S3	S2	S1/D4	D3	SMA
Pejabat struktural	15	-	8	7	-	-
Jabatan Fungsional	3	-	2	1	-	-
Staf Pelaksana (ASN)	19	1	1	8	-	9
Staf Pelaksana (Non ASN)	10	-	-	5	2	3
Jumlah	47	1	11	23	2	12

Sumber Data : Umpeg Badan Kesbangpol (Diolah Perencanaan)

Berdasarkan data di atas, pegawai Badan Kesbangpol yang berpendidikan SMA sebanyak 23,40%, berpendidikan D3 sebanyak 4,25% , berpendidikan S1/D4 sebanyak 44,68%, berpendidikan S2 sebanyak 25.53% dan berpendidikan S3 sebanyak 2,12%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata pegawai Badan Kesbangpol berpendidikan SMA dan S1/D4. Secara sederhana, gambaran pegawai Badan Kesbangpol Kota Bekasi menurut pendidikan dapat dilihat dari gambar berikut :

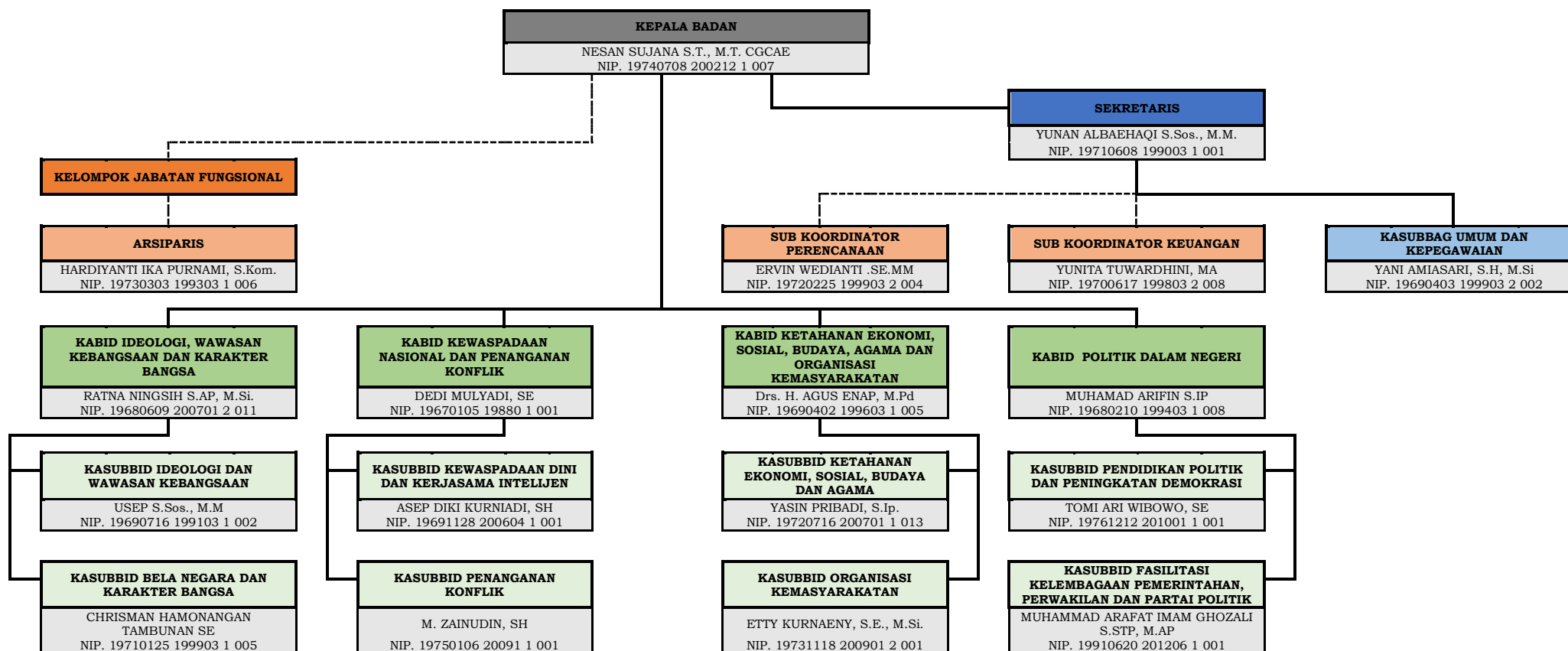
Gambar 1.3
Diagram pegawai Badan Kesbangpol Menurut Pendidikan



Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :

1. Kepala Badan, membawahkan:
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, membawahkan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - b. Sub Bidang Organisasi Masyarakat;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
 - a. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik;
6. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STUKTUR ORGANISASI BAKESBANGPOL
 (Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021)
 Gambar 1.4 Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"- 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km² yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan propinsi (UU No. 23/2014). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 23/2014 ini meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk *mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal*. Kesejahteraan rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bakesbangpol terdapat beberapa isu-isu strategis yang terjadi di tahun 2023, diantaranya Kota Bekasi termasuk ke dalam Kota Multikultural yang terdiri dari banyaknya perbedaan unsur yang ada di dalam masyarakatnya yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agama atau aliran kepercayaan, kondisi ini menjadikan Kota Bekasi sebagai daerah yang rawan konflik hal tersebut dapat menyebabkan masalah-masalah sosial yang muncul di Kota Bekasi, tidak terlepas dari meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dampaknya, kaum urban yang menjadi pengangguran menjadi beban ekonomi dan beban sosial yang berat bagi masyarakat dan pemerintah. Besarnya pengangguran akan meningkatkan kerawanan sosial di Kota Bekasi. Bakesbangpol juga di tahun 2023 telah melakukan berbagai langkah-langkah persiapan menjelang akan dilaksanakannya pemilu serentak yang akan dilakukan di tahun 2024 mendatang menjadi perhatian khusus bagi berbagai stakeholder yang terlibat, hal tersebut merupakan agenda prioritas Bakesbangpol dalam fungsi memfasilitasi jalannya pelaksanaan pemilu tersebut agar dapat berjalan dengan aman dan tertib. Berikut beberapa upaya Bakesbangpol untuk dapat mengatasi isu-isu strategis tersebut :

- Memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait netralitas ASN dan aparat negara.
- Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya politik transaksional.
- Memerangi hoaks dan ujaran kebencian melalui edukasi dan literasi digital.
- Mendorong politik yang santun dan bermartabat, tanpa menggunakan politik identitas.
- Meningkatkan keakuratan dan transparansi DPT.
- Melakukan kampanye dan sosialisasi pemilu yang efektif dan kreatif.
- Menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
- Menyelesaikan sengketa pemilu dengan cepat dan adil.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Perangkat daerah yang memfasilitasi proses pemilu, termasuk Kesatuan Bangsa dan Politik, memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan menghasilkan pemilu yang berkualitas. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi berbagai isu strategis yang dihadapi, seperti netralitas ASN, politik transaksional, hoaks dan ujaran kebencian, dan politik identitas. Dengan mengatasi berbagai isu strategis tersebut, diharapkan dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemilu yang

berkualitas dan berintegritas, yang pada akhirnya dapat menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas untuk memimpin bangsa dan negara.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dalam lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota Maju, Cerdas, Kreatif, Sejahtera dan Ihsan.

Oleh karena itu, Bakesbangpol sebagai Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan, serta Politik Dalam Negeri memiliki tugas untuk menjamin terciptanya stabilitas kantrantibmas demi mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan Bakesbangpol pada tahun 2021 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

terdiri dari 6 kegiatan dan 13 Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- ✓ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

II. Belanja Langsung Urusan (BLU)

1.1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu:

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
 - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1.2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu:

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

1.3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yaitu:

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya;
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

1.4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu:

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
- Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

1.5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan terdiri dari 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, yaitu:

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Secara umum layanan organisasi Bakesbangpol menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi Badan Kesbangpol telah dialihkan menjadi fungsi urusan penunjang lainnya di bidang Ketentraman dan ketertiban umum.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Bakesbangpol yaitu:

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan advokasi terkait wawasan kebangsaan, 4 (empat) pilar kebangsaan, bela negara, penguatan fungsi-fungsi pembauran kebangsaan dan pembentukan serta pembinaan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) di Kota Bekasi. Bidang Kesatuan Bangsa juga memiliki tugas memberikan pelatihan kepada masyarakat pemula untuk dijadikan sebagai kader bela negara.
2. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, memiliki tugas dan fungsi dalam hal menciptakan kerukunan umat beragama dan kemasyarakatan. Produk-produk layanan dalam bidang ini antara lain Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah, Survei peninjauan lokasi rumah ibadah dan sekretariat ormas, merumuskan kebijakan ormas dan kemasyarakatan, menerima audiensi pengurus rumah ibadah, pengurus ormas dan tokoh agama/masyarakat, serta Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/Surat Tanda Lapor bagi Organisasi Kemasyarakatan.
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terkait gejala/

potensi kerawanan sosial yang ada di masyarakat. Melakukan kajian dan pemetaan wilayah kerawanan sosial di Kota Bekasi. Bidang ini juga bertugas untuk memberikan fasilitasi kepada Tim Kewaspadaan Dini Daerah untuk melaksanakan tugas menjaga trantibum di Kota Bekasi. Produk layanan dari Bidang ini adalah Surat Tanda Lapor Orang Asing dan Laporan situasi dan kondisi daerah.

4. Bidang Politik Dalam Negeri, memiliki tugas dan fungsi memberikan palatihan, sosialisasi, dan pendidikan terkait politik dalam negeri kepada masyarakat, dan pengurus Partai Politik. Merumuskan kebijakan tentang bantuan hibah dan bantuan keuangan yang akan diberikan kepada Partai Politik dan Lembaga Pemerintah. Bidang ini juga memberikan fasilitasi terkait pelaksanaan Pemantauan Situasi Politik di daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN DAN PENULISAN

Sistematika penyajian LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Kontrak Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;

- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

2

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Bakesbangpol didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Bakesbangpol Kota Bekasi TA. 2023, dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2023 dengan target satuan berupa % (persen) dan Jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program, kegiatan, sub kegiatan.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Badan Tahun 2018-2023 Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kopotensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi yang telah ditetapkan dapat diketahui bahwa Visi Kota Bekasi untuk periode 2018- 2023 adalah **“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”** yang dijabarkan ke dalam 5 misi, 5 tujuan, dan 5 sasaran. Dari ke 5 misi RPJMD tersebut, Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki keterkaitan secara tupoksi terhadap misi ke 1 yaitu “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik” dan misi ke 5 RPJMD yaitu “Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman”. Misi 1 dan 5 RPJMD tersebut kemudian dijabarkan dalam 2 tujuan, yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel;
2. Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman.

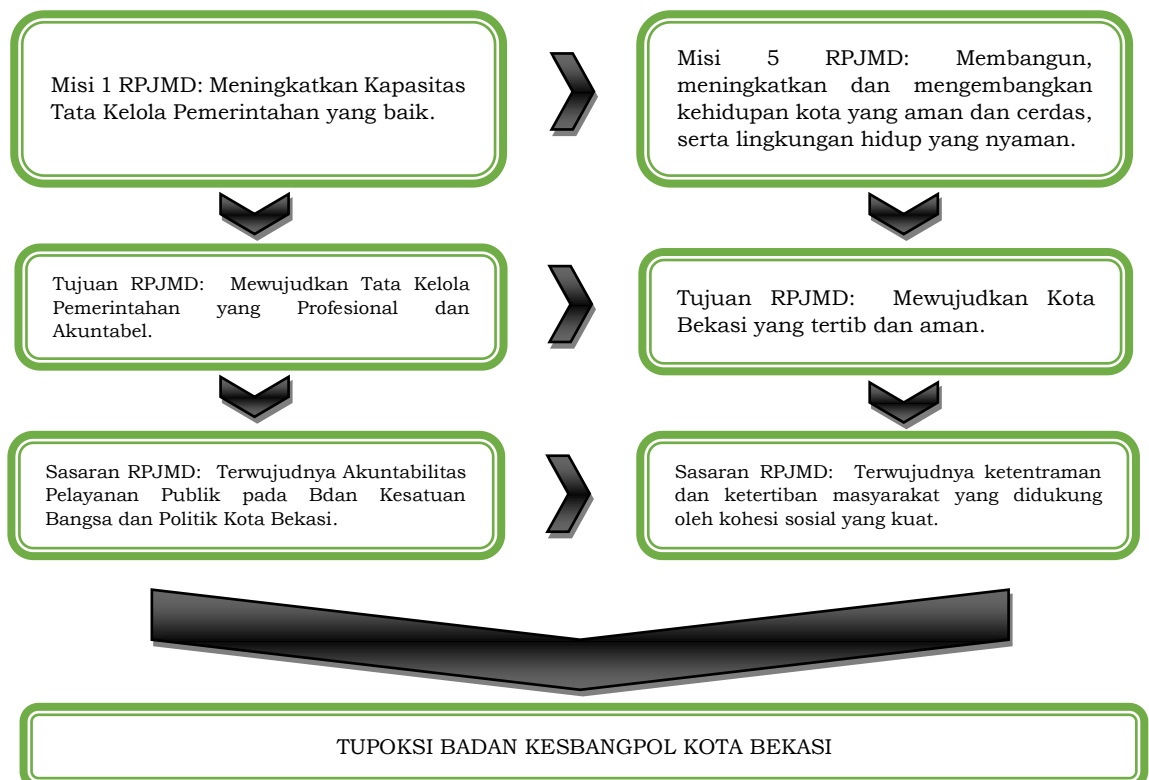
Dari misi tersebut, Badan Kesbangpol harus melakukan pemilahan terkait pencapaian tujuan pembangunan misi yang akan dilaksanakan. Berdasarkan pemilahan yang dilakukan terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang ada di dalam 2 (dua) misi tersebut maka Badan Kesbangpol Kota Bekasi menetapkan tujuan pembangunan yang menjadi tujuan badan dari 2 (dua) misi RPJMD tersebut.

Untuk misi kesatu RPJMD Kota Bekasi, ditinjau dari tujuan misi tersebut Badan Kesbangpol Kota Bekasi memiliki keterkaitan secara tupoksi dengan Tujuan RPJMD “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”. Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel ini kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran “Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi” sasaran ini diukur melalui Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sedangkan untuk misi kelima RPJMD Kota Bekasi, dengan tujuan “Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman” memiliki keterkaitan erat tupoksi Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Tujuan ini memiliki sasaran yaitu “Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat.” Sasaran

ini kemudian diukur melalui indikator kasus perselisihan SARA dan kelompok masyarakat yang terselesaikan di Kota Bekasi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik di Kota Bekasi, dan peningkatan Ormas dalam pembangunan di Kota Bekasi. Tentunya indikator ini memiliki keterkaitan yang erat dengan tupoksi yang ada di Badan Kesbangpol.

Secara ringkas Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi yang memiliki keterkaitan tupoksi dengan Badan Kesbangpol Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Berdasarkan penjelasan di atas maka Badan Kesbangpol Kota Bekasi menetapkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Startegis (Renstra) Badan Kesbangpol Kota Bekasi periode 2019-2023. Adapun tujuan dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi adalah:

1. Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi.
2. Mewujudkan kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi.

Untuk mencapai tujuan di atas maka dilakukan penetapan sasaran perangkat daerah guna mendukung tercapainya tujuan. Sasaran adalah prediksi hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan (sampai dengan 1 tahun). Adapun sasaran dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi adalah:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi;
2. Terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Meningkatkan peran serta ormas dalam pembangunan.

Secara terperinci, tabel 2.1 di bawah ini akan menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam penyelenggaraan pelayanan pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Pemaparan tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol yang telah ditetapkan ini akan dijabarkan ke dalam indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 5 (lima) tahun.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Tahun 2018-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bekasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Data Existin g	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-					
						1	2	3	4	5	
1	Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Kesbangpol		-	Cc	Cc	Bb	Bb	Bb	
				Nilai AKIP Kesbangpol	-	Cc	Cc	Bb	Bb	Bb	
2	Mewujudkan kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi	Terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Indeks Toleransi					5.971	5.998	6.025	
				Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%	100%	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	Persentase demokrasi masyarakat dalam pembangunan						9,42 %	12.04 %	14.66 %
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik	-	-	-	54.37 %	58.56 %	88.56 %		
Meningkatkan peran serta ormas dalam pembangunan	Persentase ormas yang berperan aktif dalam pembangunan daerah	-	-	-	64.2 %	77.1 %	90%				

Sumber Data: RPJMD Kota Bekasi 2019-2023 dan Renstra Badan Kesbangpol 2019- 2023

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menetapkan menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

1. Nilai AKIP Badan Kesbangpol dengan satuan nilai. Indikator ini dipilih untuk mendukung sasaran strategis Terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Alasan dipilihnya indikator ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Formulasi yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah Nilai Penilaian AKIP. Pada RPJMD Kota Bekasi 2019-2023 dijelaskan bahwa Misi ke 1 RPJMD Kota Bekasi adalah Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Adapun Tujuan RPJMD Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Misi dan tujuan RPJMD tersebut kemudian diformulasikan ke dalam IKU 1 Badan Kesbangpol;
2. Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan dengan satuan persen (%). Indikator ini dipilih untuk mendukung sasaran strategis Terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Alasan dipilihnya indikator ini adalah untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Periode 2019-2023 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Seri E). Pada RPJMD Kota Bekasi 2019-2023 dijelaskan bahwa Misi ke 5 RPJMD Kota

Bekasi adalah Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman. Adapun Tujuan RPJMD Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman. Misi dan tujuan RPJMD tersebut kemudian diformulasikan ke dalam IKU 2 Badan Kesbangpol;

3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik Indikator ini dipilih untuk mendukung sasaran strategis Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. Alasan dipilihnya indikator ini adalah untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Periode 2019-2023 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Seri E). Pada RPJMD Kota Bekasi 2019-2023 dijelaskan bahwa Misi ke 5 RPJMD Kota Bekasi adalah Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman. Adapun Tujuan RPJMD Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman. Misi dan tujuan RPJMD tersebut kemudian diformulasikan ke dalam IKU 3 Badan Kesbangpol;
4. Persentase ormas yang berperan aktif dalam pembangunan daerah Indikator ini dipilih untuk mendukung sasaran strategis Meningkatkan peran serta ormas dalam pembangunan. Alasan dipilihnya indikator ini adalah untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Periode 2019-2023 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Seri E). Pada RPJMD Kota Bekasi 2019-2023 dijelaskan bahwa Misi ke 5 RPJMD Kota Bekasi adalah Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan Kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman. Adapun Tujuan RPJMD Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman.

Misi dan tujuan RPJMD tersebut kemudian diformulasikan ke dalam IKU 4 Badan Kesbangpol.

Untuk penjelasan lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bakesbangpol

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/ RUMUS	SATUAN	TARGET 2022
1	Terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik dari Badan Kesbangpol	Nilai AKIP Kesbangpol	Nilai penilaian AKIP Badan Kesbangpol	Nilai	BB
2	Terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan	(Kasus perselisihan SARA yang diselesaikan/Kasus perselisihan SARA yang dilaporkan) x 100%	Persen	100%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik	(Jumlah pembinaan politik oleh Badan Kesbangpol Thn (N)/Jumlah total target Pembinaan Politik Thn (N) x 100%	Persen	88.56%
4	Meningkatkan peran serta ormas dalam pembangunan	Persentase ormas yang berperan aktif dalam pembangunan daerah	(Jumlah Ormas tertib administrasi/ Jumlah Total Ormas Tercatat di Kesbangpol) x 100%	Persen	90%

Sumber Data: Renstra Badan Kesbangpol 2019-2023

2.4 PERJANJIAN KINERJA 2023

Berdasarkan pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 6 (Enam) Program Pembangunan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi penunjang urusan pada bidang penunjang tertentu lainnya seperti berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
6. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program-program pada Bakesbangpol Kota Bekasi merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran Strategis kesatu adalah Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi, dengan indikator kinerja Nilai AKIP yang diperoleh oleh Badan Kesbangpol. Pada Tahun 2023, indikator menargetkan pencapaian indikator nilai AKIP Kesbangpol dengan predikat nilai BB. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, Bakesbangpol Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran strategis kedua Bakesbangpol yaitu Terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat dengan target indikator kinerja yaitu Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah kasus perselisihan SARA yang diselesaikan sebesar 100%. Pada Tahun 2023, Bakesbangpol menargetkan seluruh kasus perselisihan Suku Bangsa, Ras dan Antar Golongan dapat tertangani dengan baik. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Bakesbangpol Kota Bekasi melaksanakan 3 (Tiga) program, yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sasaran strategis ketiga Bakesbangpol yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi dengan target indikator kinerja yaitu Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah Meningkatnya partisipasi masyarakat sebesar 88.56%. Pada Tahun 2023, Bakesbangpol menargetkan peningkatan pemahaman dan peran serta warga masyarakat Kota Bekasi terhadap partisipasi dalam politik meliputi pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Politik dan Fasilitasi Lembaga serta Partai Politik. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Bakesbangpol Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga

Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Sasaran strategis keempat Bakesbangpol yaitu Meningkatnya peran serta Ormas dalam Pembangunan dengan target indikator kinerja yaitu Persentase Ormas yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah Meningkatnya peran serta Ormas sebesar 90%. Pada Tahun 2023, Bakesbangpol menargetkan Ormas yang telah diberikan pembinaan baik administrasi legalitas Ormas maupun bantuan hibah kepada Ormas diharapkan dapat lebih aktif dalam partisipasi pembangunan melalui masing-masing ruang lingkup bidang Ormas. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Bakesbangpol Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program, yaitu Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Kesbangpol	Nilai	Bb	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	BB
2	Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan	% (Persen)	100	Triwulan 1	25%
					Triwulan 2	25%
					Triwulan 3	25%
					Triwulan 4	25%
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Berdemokrasi	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik	% (Persen)	88.56%	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	88.56%
4	Meningkatnya peran serta Ormas dalam Pembangunan	Persentase Ormas yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah	% (Persen)	90	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	90%

Sumber Data: Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi TA 2022.

Untuk mencapai hasil kinerja pada tabel di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi diberikan dukungan anggaran APBD Kota sebesar Rp. 85.390.004.473,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol

PROGRAM		PAGU ANGGRAN	TRIWULAN	TARGET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.079.397.613,-	Triwulan I	Rp. 1.922.169.118,-
			Triwulan 2	Rp. 3.141.484.070,-
			Triwulan 3	Rp. 2.263.494.070,-
			Triwulan 4	Rp. 2.752.250.355,-
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.611.580.860,-	Triwulan I	Rp. 1.214.650.860,-
			Triwulan 2	Rp. 783.630.000,-
			Triwulan 3	Rp. 211.300.000,-
			Triwulan 4	Rp. 402.000.000,-
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 9.255.000.000,-	Triwulan I	Rp. 5.600.000.000,-
			Triwulan 2	Rp. 3.284.500.000,-
			Triwulan 3	Rp. 70.500.000,-
			Triwulan 4	Rp. 300.000.000,-
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 61.148.826.000,-	Triwulan I	-
			Triwulan 2	Rp. 2.325.866.000,-
			Triwulan 3	Rp. 1.189.335.000,-
			Triwulan 4	Rp. 57.633.625.000,-
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 800.000.000,-	Triwulan I	-
			Triwulan 2	Rp. 777.800.000,-
			Triwulan 3	Rp. 22.200.000,-
			Triwulan 4	-
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.495.200.000,-	Triwulan I	Rp. 154.050.000,-
			Triwulan 2	Rp. 855.620.000,-
			Triwulan 3	Rp. 316.380.000,-
			Triwulan 4	Rp. 169.150.000,-

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesbangpol Kota Bekasi TA.2023 (Lampiran 2)

3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja institusi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Proses pengukuran kinerja dilakukan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang di dalamnya menyajikan beberapa. Dokumen LKIP disusun dengan melakukan analisa dan pengumpulan data pendukung untuk melihat seberapa besar sasaran kinerja yang ditargetkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2023 dapat dicapai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi disusun dengan berpedoman kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi dilakukan dengan mengukur indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang ada di Rencana Startegis (Renstra) Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, dan aspek realisasi pelaksanaannya.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Bakesbangpol Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi telah melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan untuk mencapai Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

1. Mewujudkan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Bdan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi;

2. Mewujudkan kerukunan, toleransi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi;

Capaian setiap sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Analisis Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bekasi TA 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	KETERANGAN
1	Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi	Nilai AKIP Kesbangpol	Nilai	BB	BB	Tercapai
2	Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan	%	100	100	Tercapai
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Berdemokrasi	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik	%	88,56	88,56	Tercapai
4	Meningkatnya peran serta Ormas dalam Pembangunan	Persentase Ormas yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah	%	90	90	Tercapai

(Sumber Data: Renstra Badan Kesbangpol 2019-2023)

Secara keseluruhan capaian sasaran Badan Kesbangpol mencapai 100%. Untuk indikator ke-1 dengan sasaran terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi menggunakan model perhitungan Nilai AKIP Badan Kesbangpol.

Pada indikator ke-2 dengan sasaran terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat menggunakan model perhitungan Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan dengan rincian:

$$\frac{\text{Kasus perselisihan SARA yang diselesaikan}}{\text{Kasus perselisihan SARA yang dilaporkan}} \times 100 \%$$

Pada indikator ke-3 dengan sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi menggunakan model perhitungan Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik dengan rincian:

$$\frac{\text{Jumlah pembinaan politik oleh Badan Kesbangpol Thn (N)}}{\text{Jumlah total target pembinaan Politik Thn (N)}} \times 100 \%$$

Untuk indikator ke-4 dengan sasaran meningkatnya peran serta Ormas dalam Pembangunan menggunakan model perhitungan Persentase Ormas yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah dengan rincian:

Jumlah Ormas Tertib Administrasi x 100 %
Jumlah Total Ormas Tercatat di Kesbangpol Kota Bekasi

Pembahasan lebih rinci terkait 4 (empat) sasaran kinerja Badan Kesbangpol akan dibahas pada bagian Analisis Capaian Kinerja pada sub bab selanjutnya.

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan penjabaran tabel Analisis Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol di atas, dapat ditarik analisa mengenai pencapaian kinerja Badan Kesbangpol TA 2023. Adapun evaluasi dan analisa kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi.

Sasaran yang pertama adalah terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi. Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Nilai AKIP Kesbangpol. Sasaran ini menekankan tentang kualitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Kesbangpol kepada masyarakat. Target yang ditetapkan untuk sasaran terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik adalah nilai AKIP Kesbangpol dengan predikat nilai Bb. Adapun realisasi nilai yang berhasil didapatkan oleh Kesbangpol sebesar Bb. Upaya-upaya yang telah dilakukan Badan Kesbangpol untuk mendapatkan Nilai SAKIP BB adalah sebagai berikut:

- ✓ Melakukan sinkronasi di dalam menyusun dokumen perencanaan 5 (Lima) Tahun perangkat daerah. Sinkronasi tersebut dilakukan dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD Kota Bekasi, RPJPD Kota Bekasi, RPJMD Provinsi dan Resntra Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, serta RPJMN Kemendagri dan Renstra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (PUM) Kemendagri RI;
- ✓ Melakukan sinkronasi di dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah. Sinkronasi tersebut dilakukan dengan menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Perangkat Daerah yang selaras dengan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi

Tahun 2023, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat Tahun 2023;

- ✓ Melakukan penyusunan dokumen penerjemah dari dokumen perencanaan secara terperinci yang meliputi seluruh aspek pencapaian kinerja perencanaan perangkat daerah. Dokumen penerjemah yang dimaksud antara lain:
 - Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2023;
 - Tabel alur sasaran dan kegiatan Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kesbangpol;
 - Tabel keselerasan perencanaan Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2023;
 - Rencana Aksi kinerja pada Badan Kesbangpol untuk Tahun Anggaran 2023;
 - Pohon kinerja Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2023;
 - Cross Cutting Kinerja Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2023;
 - Cascading Badan Kesbangpol dan cascading Indikator Kinerja Individu (IKI) aparatur Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2023; dan
 - Melakukan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) per eselon hingga ke tingkat staff aparatur Badan Kesbangpol Kota Bekasi.
- ✓ Melakukan penyusunan dokumen monitoring dan pencapaian evaluasi dari pencapaian kinerja perencanaan perangkat daerah. Dokumen penerjemah yang dimaksud antara lain:
 - Evaluasi capaian kinerja Tahun Anggaran 2023 per triwulan;
 - Evaluasi capaian kinerja fisik (Monev dan Simpelbang) Tahun Anggaran 2023 per triwulan;
 - Evaluasi capaian kinerja fisik dan anggaran Tahun 2023 per bulan.

Dengan demikian, gambaran umum pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari indikator program yang mendukungnya. Pencapaian program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Capaian Program Badan Kesbangpol Untuk Mendukung Sasaran
Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari
Badan Kesbangpol Kota Bekasi

NO	PROGRAM	IDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023	REALISASI 2023	SATUAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	Persen	Tercapai

NO	PROGRAM	IDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023	REALISASI 2023	SATUAN	KET
	Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	Persen	Tercapai
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	100	Persen	Tidak Tercapai
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	Persen	Tercapai

Sumber : Sekretariat Badan Kesbangpol

- **Perbandingkan antara Data Kinerja yang telah dilaksanakan Tahun 2022 dengan Tahun lalu.**

IKU 1 : Nilai AKIP Kesbangpol

Defenisi Operasional :

Hasil Evaluasi SAKIP PD dari Inspektorat (Tahun n-1).

Dimana semakin tinggi nilai SAKIP PD berarti semakin tinggi tingkat kinerja PD.

- Realisasi Data Kinerja Tahun 2023:
 - Nilai LKIP (SAKIP) Kesbangpol (2022) : Bb (74,39)
 - Nilai LKIP (SAKIP) Kesbangpol (2023) : Bb (75,14)

Sebagaimana *definisi Operasional*, maka:

Realisasi Data Kinerja = Bb

Selanjutnya, perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Kesbangpol Tahun 2023 dengan Tahun lalu, sebagaimana tergambar pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3.
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2023 dengan Tahun lalu
(Sasaran Strategis 1)

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
1	Nilai AKIP Kesbangpol	Nilai	Bb (74,39)	Bb (75,14)

Berdasarkan penyajian tabel tersebut diatas, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu mengalami kenaikan dan melebihi target yang telah ditentukan.

- **Realisasi Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Kesbangpol 2018-2023.**

Pada tahun terakhir (tahun 2023) Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi, ditargetkan Nilai AKIP Kesbangpol adalah dengan nilai Bb. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target realisasi kinerja sampai tahun 2023 pada Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi tahun 2018-2023, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sesuai dengan target yang sudah ditentukan dengan nilai Bb, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4.
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2023
dengan Akhir Renstra-PD
(Sasaran Strategis 1)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian s.d Tahun 2022 (Nilai)	Tahun 2023		Capaian Tahun Terakhir Renstra (Nilai)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP Kesbangpol	Nilai	BB	BB	BB (74,39)	BB	BB	BB (75,14)

➤ **Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar nasional (jika ada)**

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 pada Sasaran Strategis 1 (Terwujudnya Akuntabilitas Pelayanan Publik dari Badan Kesbangpol Kota Bekasi) ini dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar atau target nasional (jika ada).

Secara khusus untuk IKU pada Sasaran Strategis 1 ini, bahwa pada tingkat nasional secara khusus tidak terdapat target mengenai indikator kinerja ini sebagaimana tergambar pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Nasional
(Sasaran Strategis 1)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023
1	Nilai AKIP Kesbangpol	BB (75,14)	Tidak Ada

2. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam kehidupan masyarakat.

Sasaran strategis yang kedua adalah terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Sasaran ini diukur dengan menggunakan Indikator **Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan**. Sasaran ini menekankan setiap ada kasus perselisihan SARA yang ada di masyarakat, Badan Kesbangpol wajib hadir dan menyelesaikannya. Target yang ditetapkan untuk sasaran terwujudnya toleransi dalam kehidupan masyarakat adalah 100% penanganan kasus SARA di Kota Bekasi dapat diselesaikan.

Tabel 3.6.
Analisis Pencapaian Indikator Utama Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi	
1	Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan	Persen	100	100	100

Sumber Data: Renstra Badan Kesbangpol 2019-2023

Berdasarkan tabel di atas, Badan Kesbangpol berhasil menekan jumlah kejadian perselisihan SARA di masyarakat. Umumnya penyebab perselisihan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang terjadi di Kota Bekasi adalah tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan yang sangat bersifat sensitif karena menyangkut tentang agama, kebangsaan/suku dan antar golongan. Tingkat pencapaian Badan Kesbangpol di dalam menangani kasus SARA di masyarakat sebesar 100% yang artinya target tercapai.

Dengan demikian, target yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Adapun faktor-faktor yang mendukung tercapainya target tersebut adalah:

- a. Terkait penyebaran paham radikalisme, Badan Kesbangpol telah melakukan upaya penggalangan yang dilakukan Badan Kesbangpol bersama instansi terkait untuk meredam pemahaman tersebut;
- b. Terbangunnya koordinasi yang baik diantara stakeholder terkait, Badan Kesbangpol bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Tim Revitalisasi

Nilai-nilai Pancasila (TRANP) Kota Bekasi saling sinergis dalam rangka meminimalisir terjadinya konflik perselisihan SARA di masyarakat yang mencakup antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya di Kota Bekasi. Pemerintah memiliki peran penting dalam menekan kasus perselisihan SARA. Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Upaya-upaya preventif dalam menekan kasus perselisihan SARA di masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi keagamaan.

Keberhasilan Badan Kesbangpol di dalam meredakan perselisihan SARA tidak terlepas dari peningkatan deteksi dini dan pemantauan kantrantibmas. Deteksi dini dan pemantauan serta menjalin sinergitas antara stakeholder terkait yang merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan kerawanan perselisihan SARA di Kota Bekasi. Selain itu, Badan Kesbangpol dalam mencapai target sasaran kinerja tersebut di dukung melalui **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan dan sub kegiatan, diantaranya :

- ✓ **Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.** Fokus dari kegiatan ini adalah mendorong minat para generasi muda terhadap pemaknaan nilai-nilai Pancasila. Sehingga diharapkan seluruh komponen khususnya generasi muda dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Adapun pelaksanaannya melalui berbagai instrumen kegiatan seperti pelatihan, pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan. Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut diharapkan kepada seluruh elemen masyarakat dapat mengenal, memahami, mengamalkan Pancasila dengan baik guna menumbuhkan rasa cinta Tanah Air, cinta Bangsa dan

Negara Indonesia. Umumnya, pelajar/generasi muda yang terlibat aktif dalam kegiatan ini.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Pembinaan Bela Negara, Pembinaan Konsepsi Dasar Kebangsaan)

Permasalahan : Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pancasila dan karakter kebangsaan.

Penyelesaian : Pengembangan metode dan materi sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pakar pendidikan, pakar komunikasi, dan tokoh masyarakat. Metode dan materi sosialisasi yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatn Kota Bekasi. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan permasalahan dalam mensosialisasikan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dapat diatasi dan Pancasila serta karakter kebangsaan dapat tertanam di lingkungan masyarakat.

- ✓ **Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.** Tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai forum yang dibentuk untuk menjaring, menampung, mengkoordinasikan seluruh informasi dari masyarakat mengenai potensi, ancaman, tantangan dan hambatan (ATHG) yang terjadi di masyarakat sehingga dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Sosialisasi Pendataan, Pembinaan, Monev dan Pengawasan Orang Asing di Kota Bekasi).

Permasalahan : Penanganan orang asing merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi kurangnya koordinasi antarpihak tersebut. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan, atau bahkan terjadinya konflik kepentingan.

Penyelesaian : Badan Kesbangpol mengusulkan adanya pembentukan forum koordinasi yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan koordinasi antarpihak. Forum koordinasi tersebut dapat berfungsi untuk membahas dan menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Forum koordinasi ini dapat dibentuk oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah).

Permasalahan : Dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah terlaksana sesuai dengan target yang telah direncanakan, namun permasalahan yang muncul terkait data pelaporan belum terakomodir dengan baik sehingga pelaksanaan laporan informasi mengenai ATHG di Kota Bekasi masih dikelola dengan metode manual.

Penyelesaian : Badan Kesbangpol akan mengajukan anggaran untuk kegiatan ini di Tahun 2024 dan perlu dibuatkan sebuah aplikasi agar informasi yang telah dijaring oleh Tim Kewaspadaan Dini dapat terdata dan terklasifikasi dengan baik dan efisien. Kegiatan ini termasuk kedalam salah satu prioritas dalam pencapaian keberhasilan indikator sasaran Badan Kesbangpol.

- ✓ **Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.** Fokus dari kegiatan ini adalah pencegahan dan penanganan masalah ketahanan ekonomi, sosial dan budaya sehingga menciptakan stabilitas kerukunan masyarakat di Kota Bekasi. Badan Kesbangpol dalam hal ini mempunyai tugas dalam membina dan memfasilitasi Forum Bentukan Pemerintah seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang mempunyai tugas sebagai agen pemberdayaan masyarakat yang berfungsi untuk memberikan advokasi kepada masyarakat terkait kerukunan umat beragama di Kota Bekasi dan Badan Kesbangpol melalui kegiatan ini turut serta dalam Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang menjadi perhatian penting dalam era globalisasi saat ini ditandai dengan maraknya peredaran narkoba yang merambah ke remaja-remaja yang menjadi penerus generasi bangsa. Bentuk pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode Sosialisasi bahaya anti narkotika dan

peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang lebih ditekankan kepada para pelajar SMA/SMK dan dalam menjaga Kerukunan Umat Beragama dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) antar para pemuka agama dalam rangka menjalin sinergi serta menjalin komunikasi untuk saling menjaga toleransi yang sudah terjalin di Kota Bekasi.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Peringatan Hari Anti Narkotika, Sosialisasi Bahaya Narkotika, Pelayanan Surat Pertimbangan Pendirian Rumah Ibadah, Fasilitasi kegiatan terkait Kerukunan Umat Beragama)

Permasalahan : Kurangnya pemahaman masyarakat tentang toleransi dan kerukunan umat beragama dan belum terjalannya komunikasi menyeluruh, baik antar internal dan eksternal stakeholder terkait dalam menjaga Kerukunan Umat Beragama di Kota Bekasi.

Penyelesaian : Dalam pelaksanaan kegiatan ini sangat berimplikasi kepada permasalahan toleransi di Kota Bekasi, terjalannya komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dengan tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang selama ini terjalin guna mewujudkan toleransi di Kota Bekasi. Pada tahun 2023 Kota Bekasi mendapat predikat Indeks Kota Toleran (IKT) dengan menempati posisi 3 (tiga) yang penaliannya dilakukan oleh lembaga setara institute. Hal ini merupakan pencapaian Kota Bekasi menjadi Kota Toleran di tengah masyarakat yang Heterogen.

Dari analisis di atas, dapat dijelaskan bahwa dengan sumberdaya anggaran yang terbatas pada Badan Kesbangpol tetap mampu mencapai target yang telah ditetapkan karena kemampuan Badan Kesbangpol di dalam melibatkan *stakeholder* terkait dan dilakukan secara kolaboratif (*Collaboratif Action*) dalam mencapai target indikator penyelesaian permasalahan perselisihan SARA di Kota Bekasi.

Dengan demikian, gambaran umum pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari indikator program yang mendukungnya. Pencapaian program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Capaian Program Badan Kesbangpol Untuk Mendukung Sasaran Terwujudnya Kerukunan dan Toleransi dalam kehidupan masyarakat

NO	PROGRAM	IDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN	KET
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	50	50	100%	Tercapai
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	100	100	100%	Tercapai
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Cakupan masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	0.18	0.18	100%	Tercapai

- **Perbandingkan antara Data Kinerja yang telah dilaksanakan Tahun 2023 dengan Tahun lalu.**

IKU 2 : Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan

Defenisi Operasional :

Kasus perselisihan SARA yang diselesaikan tahun (n) dibagi Total kasus perselisihan SARA tahun (n) dikalikan 100%.

- Realisasi Data Kinerja Tahun 2022 s.d 2023 :
 - Jumlah Kasus perselisihan SARA yang ditangani tahun n-1 (2022) : 2 Kasus
 - Jumlah Kasus perselisihan SARA yang ditangani tahun n (2023) : 2 Kasus

$$\text{Realisasi Data Kinerja} = \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

- Sebagaimana definisi operasional dari indikator kinerja ini, bahwa semakin banyak kasus/konflik yang terselesaikan dari yang ditangani berarti semakin Selanjutnya, perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan di Kota Bekasi Tahun 2022 dengan Tahun lalu, sebagaimana tergambar pada tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8.
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2023 dengan Tahun lalu (Sasaran Strategis 2)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan	Persen	100	100

Sumber : Badan Kesatuan bangsa dan Politik

Berdasarkan penyajian tabel tersebut diatas, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu tidak ada data perbandingan karena merupakan indikator baru pada Renstra perubahan tahun 2019-2023 dan realisasi target sesuai dengan target yang telah ditentukan.

- **Realisasi Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Kesbangpol 2018-2023.**

Pada tahun terakhir (tahun 2023) Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Kota Bekasi, ditargetkan Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan adalah 100%. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target realisasi kinerja sampai tahun 2023 pada Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi tahun 2018-2023, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 sebesar 100%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9.
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Akhir
Renstra-PD
(Sasaran Strategis 2)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian s.d Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Tahun Terakhir Renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100

➤ **Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar nasional (jika ada)**

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 pada Sasaran Strategis 2 (Terwujudnya kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat) ini dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan standar atau target nasional (jika ada). Secara khusus untuk IKU pada Sasaran Strategis 2 ini, bahwa pada tingkat nasional tidak terdapat target mengenai indikator kinerja ini sebagaimana tergambar pada tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10.
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target
Nasional
(Sasaran Strategis 2)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023
1	Persentase Kasus Perselisihan SARA yang diselesaikan	100%	Tidak Ada

Bahwasanya terhadap standar atau target nasional dalam hal ini dalam urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, bahwa realisasi dan capaian kinerja pada tingkat sasaran strategis ini sangat mendukung atau sejalan dengan program nasional dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Umum, yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.

Sasaran yang ketiga adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. Sasaran ini diukur dengan menggunakan Indikator **Persentase partisipasi masyarakat dalam politik**. Sasaran ini

menekankan adanya peningkatan partisipasi masyarakat politik yang mencakup partisipasi yang dilakukan secara sadar dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah, partisipasi yang dilakukan secara langsung seperti pemilu, pilkada, partisipasi yang dilakukan seperti petisi, demokrasi, dan reformasi, partisipasi yang dilakukan atau digerakkan dalam suatu lembaga yang menggerakkan, salah satunya partai politik (parpol) yang dijadikan lembaga utama dan lembaga sentral untuk mengorganisir warga negara untuk berpartisipasi. Target yang ditetapkan untuk sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi adalah 88.56% peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik hingga saat ini masih banyaknya permasalahan yang terkait dengan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik pada hakekatnya adalah aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan sebagai warga negara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan, dan mempengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Masyarakat perlu memiliki akses yang luas terhadap informasi tentang kebijakan pemerintah, program-program pemerintah, dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Informasi tersebut dapat membantu masyarakat untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan membuat keputusan yang tepat. Tingkat pencapaian Badan Kesbangpol di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik sebesar 88.56% yang artinya target tercapai. Dengan demikian, target yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Selain itu, Badan Kesbangpol dalam mencapai target sasaran kinerja tersebut di dukung melalui **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**. Upaya yang telah dilakukan oleh Bakesbangpol untuk menciptakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik adalah dengan banyak melakukan giat pembinaan sosialisasi wawasan kebangsaan pendidikan politik dengan sasaran masyarakat pemula dan fasilitasi lembaga pemerintahan serta fasilitasi partai politik untuk melaksanakan peningkatan pendidikan politik yang ada di Kota Bekasi. Kegiatan yang dimaksud antara lain :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan sub kegiatan :

- ✓ Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Fasilitasi Hibah Lembaga Pemerintahan, Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik)

Permasalahan : Badan Kesbangpol perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemberian hibah kepada Lembaga Pemerintah dan bantuan Partai Politik.

Penyelesaian : Badan Kesbangpol perlu meningkatkan kapasitas aparat yang menangani pemberian hibah dan bantuan. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan workshop. Dengan melakukan berbagai upaya tersebut, diharapkan pemberian hibah dan bantuan di daerah dapat berjalan secara optimal dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

- ✓ Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Pembinaan Pendidikan Politik bagi Masyarakat)

Permasalahan : Peningkatan fasilitasi partai politik, pendidikan politik, budaya politik dan pemantauan situasi politik merupakan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, maupun masyarakat. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi kurangnya koordinasi

antarpihak tersebut. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan, atau bahkan terjadinya konflik kepentingan.

Penyelesaian : Badan Kesbangpol perlu membangun budaya kerja kolaboratif. Budaya kerja kolaboratif dapat dibangun melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, sosialisasi, dan diskusi. Pada tahun 2023, Badan Kesbangpol Kota Bekasi melakukan kolaborasi pelaksanaan pembinaan pendidikan politik bagi Masyarakat dengan dengan Lembaga Pemerintahan lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bekasi dalam pembangunan wawasan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya masyarakat pemula yang merupakan salah satu bentuk kolaborasi pemerintahan di dalam melaksanakan tujuan pembangunan yang sama. Dengan adanya kolaborasi ini, Badan Kesbangpol Kota Bekasi melakukan efisiensi anggaran dan penggunaan SDM di dalam pembinaan politik bagi masyarakat di Kota Bekasi. Dengan demikian, gambaran umum pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari indikator program yang mendukungnya. Pencapaian program adalah sebagai berikut:

- ✓ Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Monev situasi politik daerah).

Permasalahan : Pemantauan situasi politik merupakan kegiatan yang membutuhkan sumber daya manusia dan anggaran yang tidak sedikit. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi kurangnya sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan

terjadinya keterbatasan dalam pelaksanaan pemantauan situasi politik.

Penyelesaian : Pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber daya manusia dan anggaran untuk menangani pemantauan situasi politik. Peningkatan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung kegiatan pemantauan situasi politik, dapat juga dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan workshop.

Tabel 3.11.
Capaian Program Badan Kesbangpol Untuk Mendukung Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi

NO	PROGRAM	IDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN	KET
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pembinaan Politik Daerah	5%	5%	Persentase	Tercapai

- **Perbandingkan antara Data Kinerja yang telah dilaksanakan Tahun 2023 dengan Tahun lalu.**

IKU 3 : Persentase partisipasi masyarakat dalam politik

Defenisi Operasional :

Jumlah pembinaan politik oleh Badan Kesbangpol tahun n dibagi Jumlah total Pembinaan Politik tahun n dikalikan 100%.

- Realisasi Data Kinerja Tahun 2022 s.d 2023 :
 - Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik tahun n-1 (2022) : 58,56%%
 - Jumlah peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik tahun n (2023) : 88,56%

Selanjutnya, perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik di Kota Bekasi Tahun 2023 dengan Tahun lalu, sebagaimana tergambar pada tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12.
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2023 dengan Tahun
lalu (Sasaran Strategis 3)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik	persen	58,56%	88,56%

Sumber : Badan Kesatuan bangsa dan Politik

Berdasarkan penyajian tabel tersebut diatas, pencapaian kinerja tahun lalu tidak adanya pembandingan karena bagian dari peningkatan target capaian kinerja tahun sebelumnya.

- **Realisasi Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Kesbangpol 2018-2023.**

Pada tahun terakhir (tahun 2023) Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi, ditargetkan Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik adalah 88,56%. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target realisasi kinerja sampai tahun 2023 pada Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi tahun 2018-2023, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 sebesar 88,56%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dengan Akhir
Renstra-PD
(Sasaran Strategis 3)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian s.d Tahun 2021 (%)	Tahun 2023		Capaian Tahun Terakhir Renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik	Persen	58,56	58,56	100	88,56	88,56	100

- **Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar nasional (jika ada)**

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 pada Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Berdemokrasi) ini dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar atau target nasional (jika ada). Secara khusus untuk IKU pada Sasaran Strategis 3 ini, bahwa pada tingkat nasional secara khusus tidak terdapat target mengenai

indikator kinerja ini sebagaimana tergambar pada tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14.
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Nasional
(Sasaran Strategis 3)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023
1	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik	88,56%	Tidak Ada

Bahwasanya terhadap standar atau target nasional dalam hal ini dalam urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, bahwa realisasi dan capaian kinerja pada tingkat sasaran strategis ini sangat mendukung atau sejalan dengan program nasional dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Umum, yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan.

Sasaran yang keempat adalah meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan. Sasaran ini diukur dengan menggunakan Indikator **Persentase ormas yang berperan aktif dalam pembangunan daerah.** Sasaran ini menekankan adanya peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah, salah satu perkembangan yang terjadi yaitu telah bermunculan berbagai organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat khususnya di daerah Kota Bekasi, dengan ragam macam dan jenis orientasi kegiatannya. Dalam perkembangan masyarakat sipil (*civil society*), fenomena ini menjadi momentum perkembangan kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan tanpa adanya semangat sinergitas semua komponen baik pemerintah maupun unsur masyarakat segala cita-cita pembangunan tidak akan tercapai. Ormas sebagai wadah untuk setiap individu memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan mewujudkan tujuan nasional serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun di sisi lain dari keanekaragaman jenis kegiatan, dasar pembentukan, cara menjalankan keorganisasian, cara berinteraksi dengan masyarakat,

sasaran dalam menggunakan ruang publik dengan paradigmatik yang baru, tentu akan membawa konsekuensi serius bagi tatanan kehidupan masyarakat, khususnya berhubungan dengan aturan hukum atau perundang-undangan yang ada. Badan Kesbangpol sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai tanggungjawab dalam melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan kepada organisasi kemasyarakatan tersebut, sampai saat ini jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar/tercatat pada Badan Kesbangpol sejumlah 258 Ormas terdiri dari berbagai jenis klasifikasi bidang kegiatan. Badan Kesbangpol dalam sasaran keempat ini memiliki target yang ditetapkan yaitu melalui indikator sasaran meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan adalah 90% peningkatan partisipasi ormas yang berperan aktif dalam pembangunan di Kota Bekasi. Pemerintah harus menjamin proses pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat dan dilaksanakan secara profesional. Karena itu, dalam rangka turut menciptakan pemerintahan yang menjalankan program pembangunan yang menysasar pada terpenuhinya kepentingan-kepentingan publik, elemen-elemen masyarakat turut berpartisipasi baik melalui mekanisme pengawasan informal maupun dengan menjalin kerjasama kemitraan dengan pemerintah. Pola kemitraan antara organisasi sipil dan pemerintah dalam menopang pembangunan semakin dikuatkan. Hal tersebut mencerminkan berlangsungnya sistem pemerintahan yang demokratis dan memprioritaskan kepentingan rakyat. Tingkat pencapaian Badan Kesbangpol di dalam meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan sebesar 90%. Dengan demikian, target yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Selain itu, Badan Kesbangpol dalam mencapai target sasaran kinerja tersebut di dukung melalui **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**. Upaya yang telah dilakukan oleh Bakesbangpol untuk menciptakan peningkatan ormas berperan aktif dalam pembangunan daerah adalah dengan melakukan giat pembinaan mensosialisasi undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan, pelayanan perizinan surat keterangan terdaftar/tercatat organisasi kemasyarakatan dan fasilitasi bantuan hibah kepada organisasi kemasyaratan yang ada di Kota Bekasi. Berikut kegiatan yang dimaksud antara lain:

b. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan sub kegiatan :

- ✓ Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Fasilitasi Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan)

Permasalahan : Dalam pelaksanaannya bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan permohonan dalam bentuk proposal dan setelah dilakukan verifikasi dan validasi data kelengkapan administrasi maka proses bantuan hibah diajukan kepada kepala daerah melalui Tim TAPD untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut, akan tetapi terdapat organisasi kemasyarakatan yang melakukan pengajuan bantuan hibah tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penyelesaian : Badan Kesbangpol akan mengajukan anggaran untuk kegiatan ini di Tahun 2024, disesuaikan pada kemampuan daerah dalam rangka memfasilitasi segala bentuk kebijakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Bekasi.

- ✓ Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Sosialisasi Undang-undang 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan)

Permasalahan : Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol dan merupakan salah satu prioritas dalam mendukung keberhasilan indikator sasaran dan indikator program. Semakin banyaknya organisasi yang telah di berikan pembinaan baik dalam bentuk sosialisasi mengacu pada UU 16 Tahun 2017 tentang

Organisasi Kemasyarakatan, akan tetapi masih terdapat permasalahan diantaranya legalitas di internal organisasi tersebut yang merujuk kepada masih adanya dualisme kepengurusan antar satu organisasi.

Penyelesaian : Badan Kesbangpol memberikan pelayanan pelaporan/pencatatan keberadaan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2023 Badan Kesbangpol memaksimalkan tupoksi dengan memberikan pelayanan perizinan surat keterangan pelaporan/pencatatan dan memfasilitasi/mediasi organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan Mediasi sengketa Ormas maupun Audiensi kepada Pemerintah Kota Bekasi serta memfasilitasi bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan dengan tujuan sebagai stimulus bagi Ormas untuk memperkuat fungsi masyarakat di dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah dalam berbagai bidang. Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Kesbangpol telah memberikan bantuan hibah kepada 24 (dua puluh empat) Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan, kantrantibmas, pembauran kebangsaan, sosial kemasyarakatan dan lainnya melalui anggaran murni dan perubahan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Walikota. Adapun Organisasi Kemasyarakatan tersebut adalah:

Tabel 3.15.
Analisis Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi TA 2023

NO	NAMA ORGANISASI	LINGKUP KEGIATAN	JUMLAH DANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Anggaran Belanja Murni Tahun 2023			
1	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi	Keagamaan	Rp. 2.000.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
2	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi	Keagamaan	Rp. 3.000.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
3	Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bekasi	Sosial Kemasyaraktan	Rp. 200.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
4	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Sosial Kemasyaraktan	Rp. 400.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023

NO	NAMA ORGANISASI	LINGKUP KEGIATAN	JUMLAH DANA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5	DPC Brigade Anak Serdadu	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 75.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
6	Yayasan Peduli Kasih	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 150.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
7	DPC AWPI Kota Bekasi	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 150.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
8	DPC Legium Veteran Republik	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 200.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
9	DPC Brigade 08 Kota Bekasi	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 250.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
10	LP. Tipikor Nusantara	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 150.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
11	VOX Point Indonesia	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 150.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
12	PGIS Kota Bekasi	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 300.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
13	DPD Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) Kota Bekasi	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 150.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
14	Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI)	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 100.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
15	Markas Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Bekasi	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 300.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
16	KASTRI Kota Bekasi	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 200.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
17	DPD Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 80.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
18	TOPAN-RI	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 75.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
19	DPP Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP)	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 75.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
20	DPC Baladhika Karya Kota Bekasi	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 75.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
21	Komando Pejuang Merah Putih (KPMP)	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 250.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
22	Angkatan Muda Siliwangi (AMS) 025 Kota Bekasi	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 100.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
23	Barisan Nasional, Patriot Sejati Indonesia (BANASPATI)	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 75.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
24	DPC Krida Wanita Swadira Indonesia (KWSI) Kota Bekasi	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 150.000.000,-	460/Kep.113-Kesbangpol/III/2023
	Anggaran Belanja Perubahan Tahun 2023			
25	Parisada Hindu Dharma Indonesia	Keagamaan	Rp. 250.000.000,-	460/Kep.566-Kesbangpol/XII/2023
26	DPP Mustika Hijau Rumah Barokah	Sosial Kemasyarakatan	Rp. 50.000.000,-	460/Kep.566-Kesbangpol/XII/2023

Sumber: Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan

Dari analisis di atas, dapat dijelaskan bahwa pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Badan Kesbangpol hanya memfasilitasi hibah Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tersebut dan merupakan salah satu bentuk keterlibatan Ormas dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, gambaran umum pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari indikator program yang mendukungnya. Pencapaian program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16.
Capaian Program Badan Kesbangpol Untuk Mendukung Sasaran Meningkatkan peran serta ormas dalam pembangunan

NO	PROGRAM	IDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN	KET
1	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	100%	100%	100%	Tercapai

- **Perbandingkan antara Data Kinerja yang telah dilaksanakan Tahun 2023 dengan Tahun lalu.**

IKU 4 : Persentase partisipasi masyarakat dalam politik

Defenisi Operasional :

Jumlah Ormas Tertib Administrasi dibagi Jumlah Total Ormas Tercatat di Kesbangpol Kota Bekasi dikalikan 100%.

- Realisasi Data Kinerja Tahun 2022 s.d 2023 :

- Jumlah Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan daerah tahun n-1 (2022) : 77,1%
- Jumlah Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan daerah tahun n (2023) : 90%

Selanjutnya, perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik di Kota Bekasi Tahun 2023 dengan Tahun lalu, sebagaimana tergambar pada tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.17.
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja 2022 dengan Tahun lalu
(Sasaran Strategis 4)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Persentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan daerah	persen	77,1	90

Sumber : Badan Kesatuan bangsa dan Politik

Berdasarkan penyajian tabel tersebut diatas, dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu tidak ada data perbandingan karena merupakan indikator baru pada Renstra perubahan tahun 2019-2023 dan realisasi target sesuai dengan target yang telah ditentukan.

- **Realisasi Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Kesbangpol 2018-2023.**

Pada tahun terakhir (tahun 2023) Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi, Persentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan daerah adalah 90%. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target realisasi kinerja sampai tahun 2023 pada Renstra Badan Kesbangpol Kota Bekasi tahun 2018-2023, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 sebesar 100%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.18.
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dengan Akhir Renstra-PD
(Sasaran Strategis 4)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian s.d Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Tahun Terakhir Renstra (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik	Persen	77,1	77,1	100	90	90	100

- **Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar nasional (jika ada)**

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 pada Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan) ini dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar atau target nasional (jika ada). Secara khusus untuk IKU pada Sasaran Strategis 4 ini, bahwa pada tingkat nasional secara khusus tidak terdapat target mengenai indikator kinerja ini sebagaimana tergambar pada tabel 3.19 berikut.

Tabel 3.19.
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Nasional
(Sasaran Strategis 4)

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Nasional Tahun 2023
1	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Politik	90%	Tidak Ada

Bahwasanya terhadap standar atau target nasional dalam hal ini dalam urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, bahwa realisasi dan capaian kinerja pada tingkat sasaran strategis ini sangat mendukung atau sejalan dengan program nasional dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Umum, yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 85.390.004.473,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar **Rp. 8.894.620.000,-** dan **Belanja Langsung (BL)** sebesar **Rp. 76.495.384.473,-**. **Belanja Langsung Urusan (BLU)** terdiri dari **Belanja Langsung Urusan (BLU)** dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 6.487.816.860,-** dan **Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)** dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 1.184.777.613,-**. untuk **Belanja Hibah** dianggarkan sebesar **Rp. 68.822.790.000,-**. Anggaran tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Program-Program pembangunan Badan Kesbangpol sebagai berikut:

Tabel 3.20.
Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi
Per Program Tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.080.671.740,-	Rp. 10.079.397.613,-
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 2.211.580.860,-	Rp. 2.611.580.860,-
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 8.955.000.000,-	Rp. 9.255.000.000,-
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 3.549.357.000,-	Rp. 61.148.826.000,-
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 800.000.000,-	Rp. 800.000.000,-
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.495.000.000,-	Rp. 1.495.000.000,-
	TOTAL	Rp. 27.091.809.600	Rp. 85.390.004.473

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Total Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami perubahan dari Total Pagu Anggaran sebesar Rp. **27.091.809.600,-** menjadi Rp. **85.390.004.473,-**. Adapun realisasi anggaran yang dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas;

• Belanja Tidak Langsung	: Rp	8.894.620.000,-
• Belanja Langsung Penunjang Urusan	: Rp	1.184.777.613,-
• Belanja Langsung Urusan	: Rp	6.487.816.860,-
• Belanja Hibah	: Rp	68.822.790.000,-
Jumlah	: Rp	85.390.004.473,-

Secara terperinci, realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL), Belanja Langsung Urusan (BLU), Belanja langsung Penunjang Urusan (BLPU) dan Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.21.
Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2023

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.079.397.613	9.078.207.469	90,07	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	2.960.000	98,67	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	2.960.000	98,67	Efisien
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.897.620.000	7.946.269.130	89,31	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.894.620.000	7.943.269.130	89,30	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000	3.000.000	100	Efisien
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	100,00	Efisien
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	20.000.000	100	Efisien
Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.000.000	303.345.751	94,04	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.000.000	152.289.000	89,58	Efisien
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	100	Efisien
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	18.370.000	91,85	Efisien
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	92.866.751	92,87	Efisien
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	9.820.000	98,2	Efisien
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.777.613	540.381.590	98,06	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.777.613	540.381.590	98,47	Efisien
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.000.000	265.250.998	91,88	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	235.250.998	94,10	Efisien
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	30.000.000	100	Efisien
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.611.580.860	2.373.801.860	90,90	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.611.580.860	2.373.801.860	90,90	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.611.580.860	2.373.801.860	90,90	Efisien
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	61.148.826.000	55.674.496.589	91,05	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	61.148.826.000	55.674.496.589	91,05	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	59.867.790.000	54.930.051.189	91,75	Efisien

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi (Rp)	Keu (%)	Ket
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.246.880.000	744.445.400	59,70	Efisien
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	34.156.000	0	0	Tidak Efisien
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	9.255.000.000	8.740.230.000	94,44	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	9.255.000.000	8.740.230.000	94,44	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.955.000.000	8.605.000.000	96,09	Efisien
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300.000.000	135.230.000	45,08	Tidak Efisien
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	800.000.000	661.083.000	82,64	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	800.000.000	661.083.000	82,64	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	800.000.000	661.083.000	82,64	Efisien
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.495.200.000	1.335.081.000	89,29	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.495.200.000	1.335.081.000	89,29	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	845.200.000	748.731.000	88,59	Efisien
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	650.000.000	586.350.000	90,21	Efisien
Total	85.390.004.473	77.862.899.918	91,19	Efisien

Beberapa catatan analisis pembiayaan tahun 2023 adalah melakukan efisiensi penggunaan anggaran dari total pagu sebesar Rp. **85.390.004.473,-** menjadi Rp. **77.862.899.918,-** Badan Kesbangpol berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp. **7.527.104.555,-** atau 8,81% dari total anggaran. Upaya efisiensi ini dilakukan untuk memastikan pembelanjaan anggaran yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan pencapaian target kinerja.

Untuk kedepannya efisiensi anggaran juga akan mempertimbangkan efektifitas pencapaian Zero Accident di dalam pengelolaan urusan

Pemerintahan Umum di Kota Bekasi yang memiliki target tinggi. Oleh karena itu, Badan Kesbangpol memerlukan sumber daya anggaran dan manusia yang kompeten untuk mencapai target tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 3.22.
Renja Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	APBD 2023 (Murni)	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023 Perubahan (Hasil Ev. Gub)			Nasional					Daerah				
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				27.091.809.600	47.509.419.473	85.390.004.473					60,796,626,740					
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	10.080.671.740	10.079.397.613	10.079.397.613					100 %	10,276,301,740				
8	1	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.000.000	3.000.000	3.000.000				100 %	3,000,000				
8	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	1 Laporan	3,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	8.897.620.000	8.897.620.000	8.897.620.000				100 %	9,093,250,000				
8	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1080 Orang/bulan	1080 Orang/bulan	8.894.620.000	8.894.620.000	8.894.620.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	602 Orang /bulan	9,090,250,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	APBD 2023 (Murni)	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023 Perubahan (Hasil Ev. Gub)			Nasional	Daerah				
8.1.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	18 Laporan	3,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	20.000.000						100 %	20,000,000	
8.1.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	8 Orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	12 Orang	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	330.000.000	330.000.000	330.000.000						100 %	330,000,000	
8.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	170.000.000	170.000.000	170.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	3 Paket	170,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	2 Paket	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	3 Dokumen	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	12 Laporan	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
			Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
			Semula	Menjadi	APBD 2023 (Murni)	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023 Perubahan (Hasil Ev. Gub)			Nasional	Daerah								
8	1	1	2.0 6	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	250 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	250 Dokumen	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	550.051.740	548.777.613	548.777.613						100 %	550.051.740	
8	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	550.051.740	548.777.613	548.777.613	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	12 Laporan	550.051.740	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	280.000.000	280.000.000	280.000.000						100 %	280.000.000	
8	1	1	2.0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	22 Unit	250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	25 Unit	30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	50 %	50 %	2.211.580.860	2.611.580.860	2.611.580.860						50 %	1.320.768.000	
8	1	2	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat Kota Bekasi	100 %	100 %	2.211.580.860	2.611.580.860	2.611.580.860						100 %	1.320.768.000	
8	1	2	2.0 1	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	690 Orang	840 Orang	2.211.580.860	2.611.580.860	2.611.580.860	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Pelajar dan Masyarakat	650 Orang	1.320.768.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
			Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
			Semula	Menjadi	APBD 2023 (Murni)	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023 Perubahan (Hasil Ev. Gub)			Nasional					Daerah				
		Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									Pembangunan Daerah Lainnya								
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik Daerah	5%	5%	3.549.357.000	23.268.241.000	61.148.826.000				5%	37,949,357,000					
8	1	3	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pembinaan Politik di Kota Bekasi	970 Orang	970 Orang	3.549.357.000	23.268.241.000	61.148.826.000			970 Orang	37,949,357,000					
8	1	3	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9 Dokumen	11 Dokumen	2.268.321.000	21.987.205.000	59.867.790.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat	9 Dokumen	36,668,321,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2260 Orang	2260 Orang	1.246.880.000	1.246.880.000	1.246.880.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat	2260 Orang	1,246,880,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	APBD 2023 (Murni)	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023 Perubahan (Hasil Ev. Gub)			Nasional					Daerah
8.1.3.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	34.156.000	34.156.000	34.156.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat	12 Laporan	34,156,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.1.4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang di bina	100 %	100 %	8.955.000.000	9.255.000.000	9.255.000.000						100 %	8,955,000,000	
8.1.4.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan tertiba administrasi di Kota Bekasi	24 Ormas /LSM	24 Ormas /LSM	8.955.000.000	9.255.000.000	9.255.000.000						24 Ormas/ LSM	8,955,000,000	
8.1.4.2.01.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	24 Dokumen	26 Dokumen	8.655.000.000	8.955.000.000	8.955.000.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat	24 Dokumen	8,655,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.1.4.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	300 Orang	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat	300 Orang	300,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.1.5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	Cakupan Masyarakat yang mendapat pembinaan	0,18 %	0,18 %	800.000.000	800.000.000	800.000.000						0,18 %	800,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	APBD 2023 (Murni)	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023 Perubahan (Hasil Ev. Gub)			Nasional					Daerah
	KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	peningkatan pengembangan ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya													
8	1	5	2.0	1											
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi	15 Kegiatan	15 Kegiatan	800.000.000	800.000.000	800.000.000						15 Kegiatan	800,000,000	
8	1	5	2.0	3											
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1250 Orang	1350 Orang	800.000.000	800.000.000	800.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Pelajar, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Stakeholder terkait	1250 Orang	800,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	6													
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	100 %	100 %	1.495.200.000	1.495.200.000	1.495.200.000						100 %	1,495,200,000	
8	1	6	2.0	1											
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Bekasi	100 %	100 %	1.495.200.000	1.495.200.000	1.495.200.000						100 %	1,495,200,000	
8	1	6	2.0	3											
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	400 Orang	845.200.000	845.200.000	845.200.000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Forum Bentukun Pemerintah, Stakeholder terkait, dan Masyarakat	265 Orang	845,200,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	6	2.0	5											
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	12 Laporan	12 Laporan	650.000.000	650.000.000	650.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan	Forum Bentukun Pemerintah, Stakeholder	12 Laporan	650,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	APBD 2023 (Murni)	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023 Perubahan (Hasil Ev. Gub)			Nasional	Daerah				
	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						Semua Kelurahan		Transformasi Pelayanan Publik		terkait, dan Masyarakat			
TOTAL							27.091.809.600	47.509.419.473	85.390.004.473					60.796,626,740	

4

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bansa dan Politik Kota Bekasi Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2023.

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Bakesbangpol Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerja.

Upaya penciptaan kantrantibmas di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan visi dan misi dan Bakesbangpol yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018–2023. Melihat hasil dari analisis evaluasi kinerja diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Bakesbangpol Kota Bekasi secara keseluruhan dari 4 (empat) Sasaran Strategis, dimana seluruh sasaran dapat mencapai target yang diinginkan.

4.2 KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Alokasi anggaran Bakesbangpol Kota Bekasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 85.390.004.473,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 8.894.620.000,- Belanja Langsung Urusan (BLU) Rp. 6.487.816.860,- Belanja Hibah Rp. 68.822.790.000,- Seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2023 dengan realisasi keuangan 91,19% dan realisasi fisik Kegiatan 96,16%. Dalam proses pelaksanaan penganggaran yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol di tahun 2023 mengalami perubahan anggaran yang sangat signifikan pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT), salah satu dasar dilakukan Anggaran Perubahan pada tahun 2023 yaitu karena ada catatan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) terkait dengan adanya seperti ketidaksesuaian rencana awal dengan kondisi actual dan penyesuaian kebijakan pemerintah pusat berkenaan dengan Surat Edaran (SE) Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9000.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dalam point C Nomor 2 (a) dan (b) yang berisikan tentang prosentase penganggaran Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD; dan
- b. Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Dengan dasar Surat Edaran tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi menyesuaikan NPHD kepada Lembaga yang menjadi penyelenggara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2024, sebagaimana berikut :

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bekasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Nomor : 774/Kesbangpol.Poldagri dan Nomor : 593/PR.08-PKS/3275/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2024, dengan rincian :
 - Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2024 pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 36.496.000.000,-
 - Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 54.744.000.000,-
 Jumlah Total Dana KPU pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 91.240.000.000,-
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bekasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Bekasi, Nomor : 775/Kesbangpol.Poldagri dan Nomor : 79/HK.02/K.JB-21/11/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024, dengan rincian :
 - Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 9.506.585.000,-
 - Dana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 12.728.388.000,-

Jumlah Total Dana BAWASLU pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp. 22.234.973.000,-

Adanya perubahan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.

4.3 RENCANA TINDAK

Untuk Tahun Anggaran 2024 Bakesbangpol Kota Bekasi berupaya untuk meyakinkan kepada pemilik anggaran daerah untuk lebih memprioritaskan program-program pembangunan yang ada di Bakesbangpol Kota Bekasi, khususnya di tahun 2024 terdapat urgensi Bakesbangpol dalam proses penyelenggaraan pemilu di level pemerintah daerah merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan antar perangkat daerah, dan memfasilitasi lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian tugas Bakesbangpol lebih memprioritaskan dalam giat sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat, serta memantau potensi konflik selama proses pemilu. Diharapkan kerjasama dan koordinasi yang baik, akan tercipta pemilu yang dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai.

Kendala utama yang dihadapi Bakesbangpol Kota Bekasi di dalam melaksanakan tupoksinya adalah membangun persepsi yang sama dengan entitas perencanaan anggaran daerah bahwa fungsi kesatuan bangsa dan politik adalah fungsi yang penting di dalam menunjang stabilitas pembangunan di Kota Bekasi. Dengan adanya persepsi yang sama maka alokasi penganggaran akan menempatkan Bakesbangpol sebagai perangkat daerah yang memiliki skala prioritas tertentu di dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

DATA BUKTI PENDUKUNG AKUNTABILITAS ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2023 (MURNI DAN PERUBAHAN)

SIPD		Perencanaan (RKPD) - 2023		Kota Bekasi		WARSIM SURYANA, S.IP., M.Si.	
				RKPD Perubahan 0 Hari 00 Jam 00 Menit 00 Detik			
Data Perangkat Daerah							
Cari Perangkat Daerah...							
Tampil: 20 baris		First Previous 1 Next Last					
Nama	Total Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Terbuka	Rincian Terbuka	Batasan Pagu	Sebelum Perubahan	Pagu Validasi	Realisasi
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	21	0	0	47.509.419.473	27.091.809.600	47.509.419.473	0

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bekasi
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8 01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							26,396,626,740	27,091,809,600	47,509,419,473					142,119,984,520			
8 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
		Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%		%	100 %	100 %		10,276,301,740	10,080,671,740	10,079,397,613				100 %	10,028,743,960			
8 01 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %		3,000,000	3,000,000	3,000,000				100 %	3,000,000			
8 01 01 2.01 06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan		3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Bekasi Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polbukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	1 Laporan	3,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %		9,093,250,000	8,897,620,000	8,897,620,000				100 %	8,900,620,000			
8 01 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1080 Orang/bulan	1080 Orang/bulan		9,090,250,000	8,894,620,000	8,894,620,000	Kota Bekasi Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polbukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	1080 Orang/bulan	8,897,620,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 01 2.02 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan		3,000,000	3,000,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polbukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	18 Laporan	3,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %		20,000,000	20,000,000	20,000,000				100 %	20,000,000			
8 01 01 2.05 09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				8 Orang	8 Orang		20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Bekasi Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polbukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	8 Orang	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %		330,000,000	330,000,000	330,000,000				100 %	330,000,000			
8 01 01 2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				3 Paket	3 Paket		170,000,000	170,000,000	170,000,000	Kota Bekasi Bekasi Selatan, Margajaya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polbukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	3 Paket	170,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2 Paket	2 Paket		30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Bekasi Bekasi Selatan, Margajaya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polbukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	2 Paket	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bekasi
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	3 Dokumen	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	12 Laporan	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				250 Dokumen	250 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	250 Dokumen	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	550,051,740	550,051,740	548,777,613						100 %	495,123,960		
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	550,051,740	550,051,740	548,777,613	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	12 Laporan	495,123,960	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	280,000,000	280,000,000	280,000,000						100 %	280,000,000		
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	22 Unit	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	22 Unit	250,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Margajaya	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Badan Kesbangpol Kota Bekasi	25 Unit	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%		%	50 %	50 %	1,320,768,000	2,211,580,860	2,611,580,860						50 %	2,290,812,860		
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemertanian Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat Kota Bekasi	%		%	100 %	100 %	1,320,768,000	2,211,580,860	2,611,580,860						100 %	2,290,812,860		
8 01 02 2.01 03	Relaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				690 Orang	840 Orang	1,320,768,000	2,211,580,860	2,611,580,860	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Pelajar, Masyarakat, dan Ormas/ LSM	840 Orang	2,290,812,860	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bekasi
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik Daerah	%	%	%	5 %	5 %	3,549,357,000	3,549,357,000	23,268,241,000					5 %	118,822,616,000		
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pembinaan Politik di Kota Bekasi	Orang	Orang	Orang	970 Orang	970 Orang	3,549,357,000	3,549,357,000	23,268,241,000					970 Orang	118,822,616,000		
8 01 03 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				9 Dokumen	11 Dokumen	2,268,321,000	2,268,321,000	21,987,205,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Pembangunan Daerah Lainnya	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat	11 Dokumen	117,288,460,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2260 Orang	2260 Orang	1,246,880,000	1,246,880,000	1,246,880,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Lainnya	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat	2260 Orang	1,500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,				12 Laporan	12 Laporan	34,156,000	34,156,000	34,156,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga pemerintah, Partai Politik, Pelajar dan Masyarakat	12 Laporan	34,156,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bekasi
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah organisasi masyarakat yang di bina	%		%	100 %	100 %	8,955,000,000	8,955,000,000	9,255,000,000						100 %	8,595,411,700		
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapatkan pembinaan tertib administrasi di Kota Bekasi	Ormas/ LSM		Ormas/ LSM	24 Ormas/ LSM	24 Ormas/ LSM	8,955,000,000	8,955,000,000	9,255,000,000						24 Ormas/ LSM	8,595,411,700		
8 01 04 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				24 Dokumen	26 Dokumen	8,655,000,000	8,655,000,000	8,955,000,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Pembangunan Daerah Lainnya	Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat	26 Dokumen	7,850,411,700	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 04 2.01 03	Relaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				300 Orang	300 Orang	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Pembangunan Daerah Lainnya	Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat	300 Orang	745,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya	%		%	0,18 %	0,18 %	800,000,000	800,000,000	800,000,000						0,18 %	1,000,000,000		
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kota Bekasi	Kegiatan		Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	800,000,000	800,000,000	800,000,000						15 Kegiatan	1,000,000,000		
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1250 Orang	1350 Orang	800,000,000	800,000,000	800,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Pothukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Pembangunan Daerah Lainnya	Pelajar, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Stakeholder terkait	1350 Orang	1,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Bekasi
Tahun 2023**

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik yang disebabkan oleh suku, ras dan antar golongan	%		%	100 %	100 %	1,495,200,000	1,495,200,000	1,495,200,000					100 %	1,382,400,000		
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Bekasi	%		%	100 %	100 %	1,495,200,000	1,495,200,000	1,495,200,000					100 %	1,382,400,000		
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				400 Orang	400 Orang	845,200,000	845,200,000	845,200,000	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung Pembangunan Daerah Lainnya	Forum Bentukun Pemerintah, Stakeholder terkait, dan Masyarakat	400 Orang	845,200,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	650,000,000	650,000,000	650,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan	Forum Bentukun Pemerintah, Stakeholder terkait, dan Masyarakat	12 Laporan	537,200,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL								26,396,626,740	27,091,809,600	47,509,419,473						142,119,984,520		

**PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2023**



simd@ keuangan ver 2.9

copyright @2004 - 2020 by BPKP

[@simdaindonesia](#)
[@simda_indonesia](#)
simda@bpkp.go.id

developed by satgas@simda.id

SUMBER : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA TAHUN 2023 PADA PAGU ANGGARAN PERUBAHAN BAKESBANGPOL (HTTPS://SIMDA.BEKASIKOTA.GO.ID:2880/#/CLIENT/NTAAYW8TEXXBA==))

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	Jumlah					T+1	
				T						
				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2			9	5	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				80.460.630.473,00	4.929.374.000,00	0,00	0,00	85.390.004.473,00	0,00
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik				80.460.630.473,00	4.929.374.000,00	0,00	0,00	85.390.004.473,00	0,00
8.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				10.079.397.613,00	0,00	0,00	0,00	10.079.397.613,00	0,00
8.01 . 01 . 2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
8.01 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Kota Bekasi Semua Kecamatan Semua Kelurahan		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
8.01 . 01 . 2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>				8.897.620.000,00	0,00	0,00	0,00	8.897.620.000,00	0,00
8.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Kota Bekasi Bekasi Selatan Margajaya		8.894.620.000,00	0,00	0,00	0,00	8.894.620.000,00	0,00
8.01 . 01 . 2.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Semua Kabupaten/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
8.01 . 01 . 2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
8.01 . 01 . 2.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Kota Bekasi Semua Kecamatan Semua Kelurahan		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
8.01 . 01 . 2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00	0,00
8.01 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SILPA	Kota Bekasi Bekasi Selatan Margajaya		170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00
8.01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SILPA	Kota Bekasi Bekasi Selatan Margajaya		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										
KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH					T+1	
				T-1	T					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2			9	5	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
8.01 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SILPA	Kota Bekasi Bekasi Selatan Margajaya		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
8.01 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak	Kota Bekasi Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Bekasi Bekasi Selatan Margajaya		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
8.01 . 01 . 2.06 . 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Bekasi Bekasi Selatan Margajaya		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
8.01 . 01 . 2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				548.777.613,00	0,00	0,00	0,00	548.777.613,00	0,00
8.01 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Kota Bekasi Bekasi Selatan Margajaya		548.777.613,00	0,00	0,00	0,00	548.777.613,00	0,00
8.01 . 01 . 2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00	0,00
8.01 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak	Kota Bekasi Bekasi Selatan Margajaya		250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00
8.01 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Bekasi Bekasi Selatan Margajaya		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
8.01 . 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan				2.611.580.860,00	0,00	0,00	0,00	2.611.580.860,00	0,00
8.01 . 02 . 2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>				2.611.580.860,00	0,00	0,00	0,00	2.611.580.860,00	0,00
8.01 . 02 . 2.01 . 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Semua Kabupaten/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan		2.611.580.860,00	0,00	0,00	0,00	2.611.580.860,00	0,00
8.01 . 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				56.225.226.000,00	4.923.600.000,00	0,00	0,00	61.148.826.000,00	0,00
8.01 . 03 . 2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>				56.225.226.000,00	4.923.600.000,00	0,00	0,00	61.148.826.000,00	0,00
8.01 . 03 . 2.01 . 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Semua Kabupaten/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan		54.944.190.000,00	4.923.600.000,00	0,00	0,00	59.867.790.000,00	0,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										
KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH						T+1
				T-1	T				T+1	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2			9	5	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
8.01 . 03 . 2.01 . 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Bekasi Semua Kecamatan Semua Kelurahan		1.246.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.246.880.000,00	0,00
8.01 . 03 . 2.01 . 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak	Kota Bekasi Semua Kecamatan Semua Kelurahan		34.156.000,00	0,00	0,00	0,00	34.156.000,00	0,00
8.01 . 04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				9.255.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.255.000.000,00	0,00
8.01 . 04 . 2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>				9.255.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.255.000.000,00	0,00
8.01 . 04 . 2.01 . 01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Kota Bekasi Semua Kecamatan Semua Kelurahan		8.955.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.955.000.000,00	0,00
8.01 . 04 . 2.01 . 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Bekasi Semua Kecamatan Semua Kelurahan		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00
8.01 . 05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya				794.226.000,00	5.774.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00
8.01 . 05 . 2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>				794.226.000,00	5.774.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00
8.01 . 05 . 2.01 . 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Semua Kabupaten/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan		794.226.000,00	5.774.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00
8.01 . 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				1.495.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.495.200.000,00	0,00
8.01 . 06 . 2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>				1.495.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.495.200.000,00	0,00
8.01 . 06 . 2.01 . 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Bekasi Semua Kecamatan Semua Kelurahan		845.200.000,00	0,00	0,00	0,00	845.200.000,00	0,00
8.01 . 06 . 2.01 . 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kabupaten/Kota		650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	0,00

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										
KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH						T+1
				T-1	T				9	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2			9	5	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		a Semua Kecamatan Semua Kelurahan							
			Jumlah		80.460.630.473,00	4.929.374.000,00	0,00	0,00	85.390.004.473,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BEKASI
REALISASI BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

per Sabtu, 30 September 2023

Urusan Pemerintahan	: 4 . 12	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik
Unit Organisasi	: 4 . 12 . 01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sub Unit Organisasi	: 4 . 12 . 01 . 01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.12 . 4.12.01.01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	49,33	1.520.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	49,33	1.520.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.897.620.000,00	5.667.880.245,00	1.500.000,00	0,00	5.669.380.245,00	63,72	3.228.239.755,00
4.12 . 4.12.01.01 . 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.894.620.000,00	5.667.880.245,00	0,00	0,00	5.667.880.245,00	63,72	3.226.739.755,00
4.12 . 4.12.01.01 . 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	50,00	1.500.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.000.000,00	0,00	241.851.301,00	0,00	241.851.301,00	73,29	88.148.699,00
4.12 . 4.12.01.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.000.000,00	0,00	143.349.000,00	0,00	143.349.000,00	84,32	26.651.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	0,00	21.915.000,00	0,00	21.915.000,00	73,05	8.085.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	0,00	13.480.000,00	0,00	13.480.000,00	67,40	6.520.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	0,00	53.287.301,00	0,00	53.287.301,00	53,29	46.712.699,00
4.12 . 4.12.01.01 . 06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	0,00	9.820.000,00	0,00	9.820.000,00	98,20	180.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.051.740,00	0,00	363.859.115,00	0,00	363.859.115,00	66,15	186.192.625,00
4.12 . 4.12.01.01 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550.051.740,00	0,00	363.859.115,00	0,00	363.859.115,00	66,15	186.192.625,00
4.12 . 4.12.01.01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.000.000,00	0,00	170.834.958,00	0,00	170.834.958,00	61,01	109.165.042,00
4.12 . 4.12.01.01 . 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000,00	0,00	154.334.958,00	0,00	154.334.958,00	61,73	95.665.042,00
4.12 . 4.12.01.01 . 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	55,00	13.500.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 15	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.211.580.860,00	0,00	1.878.428.400,00	0,00	1.878.428.400,00	84,94	333.152.460,00
4.12 . 4.12.01.01 . 15.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.211.580.860,00	0,00	1.878.428.400,00	0,00	1.878.428.400,00	84,94	333.152.460,00

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.12 . 4.12.01.01 . 16	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, ser	3.549.357.000,00	600.000.000,00	84.620.000,00	0,00	684.620.000,00	19,29	2.864.737.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 16.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi P	2.268.321.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	26,45	1.668.321.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 16.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	1.246.880.000,00	0,00	84.620.000,00	0,00	84.620.000,00	6,79	1.162.260.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 16.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sert	34.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.156.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 17	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan	8.955.000.000,00	8.305.000.000,00	101.750.000,00	0,00	8.406.750.000,00	93,88	548.250.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 17.01	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.655.000.000,00	8.305.000.000,00	0,00	0,00	8.305.000.000,00	95,96	350.000.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 17.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300.000.000,00	0,00	101.750.000,00	0,00	101.750.000,00	33,92	198.250.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 18	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	800.000.000,00	0,00	400.295.000,00	0,00	400.295.000,00	50,04	399.705.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 18.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	800.000.000,00	0,00	400.295.000,00	0,00	400.295.000,00	50,04	399.705.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 19	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan	1.495.200.000,00	0,00	1.084.796.000,00	0,00	1.084.796.000,00	72,55	410.404.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 19.03	Penanganan Konflik Sosial Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	845.200.000,00	0,00	699.746.000,00	0,00	699.746.000,00	82,79	145.454.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 19.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	650.000.000,00	0,00	385.050.000,00	0,00	385.050.000,00	59,24	264.950.000,00
JUMLAH		27.091.809.600,00	14.572.880.245,00	4.329.414.774,00	0,00	18.902.295.019,00	69,77	8.189.514.581,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN TAHUN 2023								Halaman 2 dari 3

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			27.091.809.600,00	85.390.004.473,00	58.298.194.873,00	215,19
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik			27.091.809.600,00	85.390.004.473,00	58.298.194.873,00	215,19
8.01 . 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			10.080.671.740,00	10.079.397.613,00	(1.274.127,00)	(0,01)
8.01 . 01 . 2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
8.01 . 01 . 2.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Kota Bekasi Semua Kecamatan Semua Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
8.01 . 01 . 2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			8.897.620.000,00	8.897.620.000,00	0,00	0,00
8.01 . 01 . 2.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Kota Bekasi Bekasi Selatan Margajaya	8.894.620.000,00	8.894.620.000,00	0,00	0,00
8.01 . 01 . 2.02 . 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Kota Bekasi Bekasi Selatan Margajaya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
8.01 . 01 . 2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
8.01 . 01 . 2.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Kota Bekasi Semua Kecamatan Semua Kelurahan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
8.01 . 01 . 2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00
8.01 . 01 . 2.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SILPA	Kota Bekasi Bekasi Selatan Margajaya	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
8.01 . 01 . 2.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SILPA	Kota Bekasi Bekasi Selatan Margajaya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
8.01 . 01 . 2.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SILPA	Kota Bekasi Bekasi Selatan Margajaya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
8.01 . 01 . 2.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak	Kota Bekasi Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
8.01 . 01 . 2.06 . 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Bekasi Bekasi Selatan Margajaya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							
KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
8.01 . 01 . 2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			550.051.740,00	548.777.613,00	(1.274.127,00)	(0,23)
8.01 . 01 . 2.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Kota Bekasi Bekasi Selatan Margajaya	550.051.740,00	548.777.613,00	(1.274.127,00)	(0,23)
8.01 . 01 . 2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00
8.01 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak	Kota Bekasi Bekasi Selatan Margajaya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
8.01 . 01 . 2.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Bekasi Bekasi Selatan Margajaya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
8.01 . 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan			2.211.580.860,00	2.611.580.860,00	400.000.000,00	18,09
8.01 . 02 . 2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>			2.211.580.860,00	2.611.580.860,00	400.000.000,00	18,09
8.01 . 02 . 2.01 . 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Semua Kabupaten/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2.211.580.860,00	2.611.580.860,00	400.000.000,00	18,09
8.01 . 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			3.549.357.000,00	61.148.826.000,00	57.599.469.000,00	1.622,81
8.01 . 03 . 2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>			3.549.357.000,00	61.148.826.000,00	57.599.469.000,00	1.622,81
8.01 . 03 . 2.01 . 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Semua Kabupaten/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2.268.321.000,00	59.867.790.000,00	57.599.469.000,00	2.539,30
8.01 . 03 . 2.01 . 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Bekasi Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1.246.880.000,00	1.246.880.000,00	0,00	0,00
8.01 . 03 . 2.01 . 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak	Kota Bekasi Semua Kecamatan Semua Kelurahan	34.156.000,00	34.156.000,00	0,00	0,00
8.01 . 04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			8.955.000.000,00	9.255.000.000,00	300.000.000,00	3,35
8.01 . 04 . 2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>			8.955.000.000,00	9.255.000.000,00	300.000.000,00	3,35

REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							
KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
8.01 . 04 . 2.01 . 01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Kota Bekasi Semua Kecamatan Semua Kelurahan	8.655.000.000,00	8.955.000.000,00	300.000.000,00	3,47
8.01 . 04 . 2.01 . 03		Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Bekasi Semua Kecamatan Semua Kelurahan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
8.01 . 05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya			800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00
8.01 . 05 . 2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>			800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00
8.01 . 05 . 2.01 . 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Semua Kabupaten/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00
8.01 . 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			1.495.200.000,00	1.495.200.000,00	0,00	0,00
8.01 . 06 . 2.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>			1.495.200.000,00	1.495.200.000,00	0,00	0,00
8.01 . 06 . 2.01 . 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Bekasi Semua Kecamatan Semua Kelurahan	845.200.000,00	845.200.000,00	0,00	0,00
8.01 . 06 . 2.01 . 05		Dana Bagi Hasil (DBH)	Semua Kabupaten/Kota Semua Kecamatan Semua Kelurahan	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah				27.091.809.600,00	85.390.004.473,00	58.298.194.873,00	215,19



PEMERINTAH KOTA BEKASI
REALISASI BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

per Minggu, 31 Desember 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.12 . 4.12.01.01 . 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	0,00	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	98,67	40.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	0,00	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	98,67	40.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.897.620.000,00	7.943.269.130,00	3.000.000,00	0,00	7.946.269.130,00	89,31	951.350.870,00
4.12 . 4.12.01.01 . 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.894.620.000,00	7.943.269.130,00	0,00	0,00	7.943.269.130,00	89,30	951.350.870,00
4.12 . 4.12.01.01 . 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00
4.12 . 4.12.01.01 . 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00
4.12 . 4.12.01.01 . 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00
4.12 . 4.12.01.01 . 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.000.000,00	0,00	303.345.751,00	0,00	303.345.751,00	91,92	26.654.249,00
4.12 . 4.12.01.01 . 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.000.000,00	0,00	152.289.000,00	0,00	152.289.000,00	89,58	17.711.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00
4.12 . 4.12.01.01 . 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	0,00	18.370.000,00	0,00	18.370.000,00	91,85	1.630.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	0,00	92.866.751,00	0,00	92.866.751,00	92,87	7.133.249,00
4.12 . 4.12.01.01 . 06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000,00	0,00	9.820.000,00	0,00	9.820.000,00	98,20	180.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.777.613,00	0,00	540.381.590,00	0,00	540.381.590,00	98,47	8.396.023,00
4.12 . 4.12.01.01 . 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.777.613,00	0,00	540.381.590,00	0,00	540.381.590,00	98,47	8.396.023,00
4.12 . 4.12.01.01 . 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.000.000,00	0,00	265.250.998,00	0,00	265.250.998,00	94,73	14.749.002,00
4.12 . 4.12.01.01 . 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000,00	0,00	235.250.998,00	0,00	235.250.998,00	94,10	14.749.002,00
4.12 . 4.12.01.01 . 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	100,00	0,00
4.12 . 4.12.01.01 . 15	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.611.580.860,00	0,00	2.373.801.860,00	0,00	2.373.801.860,00	90,90	237.779.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 15.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.611.580.860,00	0,00	2.373.801.860,00	0,00	2.373.801.860,00	90,90	237.779.000,00

KODE	URATAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
4.12 . 4.12.01.01 . 16	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, ser	61.148.826.000,00	54.930.051.189,00	744.445.400,00	0,00	55.674.496.589,00	91,05	5.474.329.411,00
4.12 . 4.12.01.01 . 16.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi P	59.867.790.000,00	54.930.051.189,00	0,00	0,00	54.930.051.189,00	91,75	4.937.738.811,00
4.12 . 4.12.01.01 . 16.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	1.246.880.000,00	0,00	744.445.400,00	0,00	744.445.400,00	59,70	502.434.600,00
4.12 . 4.12.01.01 . 16.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sert	34.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.156.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 17	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	9.255.000.000,00	8.605.000.000,00	135.230.000,00	0,00	8.740.230.000,00	94,44	514.770.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 17.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.955.000.000,00	8.605.000.000,00	0,00	0,00	8.605.000.000,00	96,09	350.000.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 17.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300.000.000,00	0,00	135.230.000,00	0,00	135.230.000,00	45,08	164.770.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 18	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	800.000.000,00	0,00	655.383.000,00	5.700.000,00	661.083.000,00	82,64	138.917.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 18.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	800.000.000,00	0,00	655.383.000,00	5.700.000,00	661.083.000,00	82,64	138.917.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 19	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.495.200.000,00	0,00	1.335.081.000,00	0,00	1.335.081.000,00	89,29	160.119.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 19.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	845.200.000,00	0,00	748.731.000,00	0,00	748.731.000,00	88,59	96.469.000,00
4.12 . 4.12.01.01 . 19.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	650.000.000,00	0,00	586.350.000,00	0,00	586.350.000,00	90,21	63.650.000,00
JUMLAH		85.390.004.473,00	71.478.320.319,00	6.378.879.599,00	5.700.000,00	77.862.899.918,00	91,19	7.527.104.555,00
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN TAHUN 2023								Halaman 2 dari 3